

No. Katalog
4102002.7315

Indeks
Pembangunan
Manusia

IPM



2020

BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN PINRANG



Indeks
Pembangunan
Manusia

IPM



2020



Indeks Pembangunan Manusia

Kabupaten Pinrang 2020

Katalog BPS : 4102002.7315

Ukuran Buku : 15 cm x 21 cm

Jumlah Halaman : ix + 87

Naskah

BPS Kabupaten Pinrang

Gambar Kulit

Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik

BPS Kabupaten Pinrang

Diterbitkan Oleh

Badan Pusat Statistik Kabupaten Pinrang

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

2020

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA
KABUPATEN PINRANG

Kata Pengantar


Indeks Pembangunan Manusia merupakan salah satu tolak ukur kinerja pemerintah secara keseluruhan. Terdapat tiga unsur dalam pengukuran IPM. Dimensi kesehatan direpresentasikan dalam indikator angka harapan hidup (AHH), dimensi pengetahuan oleh indikator harapan lama sekolah (HLS) dan rata-rata lama sekolah (RLS), serta dimensi kehidupan yang layak direpresentasikan oleh pengeluaran perkapita (PPP). Keseluruhan indikator diatas dirangkum dalam suatu nilai tunggal yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Publikasi IPM Kabupaten Pinrang 2020 berisi tentang pencapaian IPM di Kabupaten Pinrang tahun 2019. Semoga publikasi ini bermanfaat bagi semua kalangan yang berkepentingan. Terimakasih kepada pihak yang membantu terbitnya publikasi ini. Saran dan kritik sangat kami harapkan.

Pinrang, Oktober 2020

BPS KABUPATEN PINRANG

Kepala,



Muhammad Asri Lanong, SE

NIP. 19661121 199301 1 001

Daftar Singkatan

ABH	: Angka Buta Huruf
AHH	: Angka Harapan Hidup
AMH	: Angka Melek Huruf
APS	: Angka Partisipasi Sekolah
BOS	: Bantuan Operasional Sekolah
EYS	: Expected Years of schooling
EYS	: Expected Years of Schooling
GNP	: Gross National Product
HDI	: Human Development Index
HDR	: Human Development Report
HLS	: Harapan Lama Sekolah
IPM	: Indeks Pembangunan Manusia
MDG's	: Millenium Development Goals
MYS	: Mean Years of Schooling
PDRB	: Produk Domestik Regional Bruto
PPP	: Purcashing Power Parity
PUSTU	: Puskesmas Pembantu
RLS	: Rata-rata Lama Sekolah
SD	: Sekolah Dasar
SLTP	: Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama
SLTA	: Sekolah Lanjutan Tingkat Atas

SUSENAS	: Survei Sosial Ekonomi Nasional
ADHB	: Atas Dasar Harga Berlaku
ADHK	: Atas Dasar Harga Konstan
TPT	: Tingkat Pengangguran Terbuka
UNDP	: United Nations Development Programme
UUD	: Undang-Undang Dasar

<https://pinrangkab.bps.go.id>

Daftar Isi

	Halaman
Kata Pengantar.....	i
Daftar Singkatan	ii
Daftar Isi.....	iv
Daftar Gambar	vi
Daftar Tabel.....	viii
Bab 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	6
1.2 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Metode Baru	9
Bab 2 VARIABEL TERKAIT IPM	14
2.1 Kependudukan	15
2.2 Pendidikan	19
2.2.1 Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah.....	32
2.3 Kesehatan	36
2.3.1 Harapan Hidup	39
2.3.2 Keluarga Berencana	44
2.3.3 Pemberian ASI	46
2.4 Pengeluaran Perkapita.....	47
Bab 3 INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)	55
3.1 Sumber Data	55
3.2 Manfaat IPM.....	55
3.3 Komponen Indeks Pembangunan Manusia	56
3.3.1 Indeks Kesehatan	56
3.3.2 Indeks Pengetahuan.....	57
3.3.3 Standar Hidup Layak.....	60
3.3.4 Reduksi Shortfall	64

3.4	Gambaran Pencapaian Pembangunan Manusia Kabupaten Pinrang.....	67
	Daftar Istilah Statistik	76
	Daftar Pustaka	87

<https://pinrangkab.bps.go.id>

Daftar Gambar

Halaman

Gambar 1 Diagram Hitung IPM	13
Gambar 2 Persentase Penduduk Pinrang Menurut Kecamatan Tahun 2019.....	15
Gambar 3 Persentase Penduduk Kabupaten Pinrang Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2019	18
Gambar 4 Angka Partisipasi Sekolah Kabupaten Pinrang 2014-2019.....	20
Gambar 5 Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Pinrang dan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010-2019	33
Gambar 6 Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Penduduk Umur 25 Tahun Keatas Kabupaten Pinrang dan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010-2019.....	35
Gambar 7 Persentase rumah tangga menurut sumber air utama untuk mandi/cuci/dll, 2019.....	37
Gambar 8 Angka Harapan Hidup Penduduk Kabupaten Pinrang Tahun 2010-2019	39
Gambar 9 Banyaknya Dokter Spesialis, Dokter Umum dan Dokter Gigi di Kabupaten Pinrang Tahun 2019	43
Gambar 10 Jumlah Peserta KB Aktif menurut jenia alat KB Tahun 2019.....	46

Gambar 11 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Pinrang Tahun 2008-2019	48
Gambar 12 Pengeluaran Perkapita Pertahun Kabupaten Pinrang Tahun 2010-2019 (dalam ribuan rupiah)	50
Gambar 13 IPM Kabupaten Pinrang 2011-2019	68
Gambar 14 Reduksi Shortfall per tahun, 2010-2019.....	74

<https://pinrangkab.bps.go.id>

Daftar Tabel

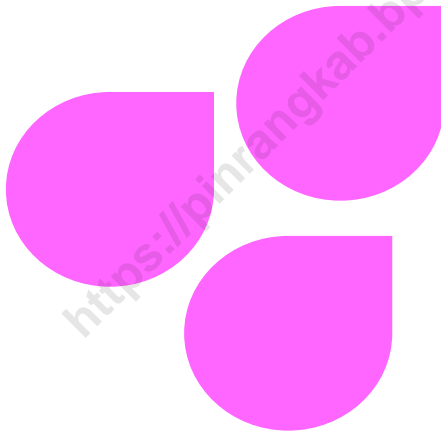
Halaman

Tabel 1 Persentase Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Pinrang Tahun 2015-2019.....	16
Tabel 2 Banyaknya Sekolah, Guru, Murid Tingkat Pendidikan SD Menurut Kecamatan di Kabupaten Pinrang Tahun Ajaran 2018/2019	24
Tabel 3 Banyaknya Sekolah, Guru, Murid Tingkat Pendidikan MI Menurut Kecamatan di Kabupaten Pinrang Tahun Ajaran 2018/2019	25
Tabel 4 Banyaknya Sekolah, Guru, Murid Tingkat Pendidikan SMP Menurut Kecamatan di Kabupaten Pinrang Tahun Ajaran 2018/2019	26
Tabel 5 Banyaknya Sekolah, Guru, Murid Tingkat Pendidikan MTs Menurut Kecamatan di Kabupaten Pinrang Tahun Ajaran 2018/2019	27
Tabel 6 Banyaknya Sekolah, Guru, Murid Tingkat Pendidikan SMA/SMK Menurut Kecamatan di Kabupaten Pinrang Tahun Ajaran 2018/2019	29
Tabel 7 Banyaknya Sekolah, Guru, Murid Tingkat Pendidikan MA Menurut Kecamatan di Kabupaten Pinrang Tahun Ajaran 2018/2019.....	30
Tabel 8 Banyaknya Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Pinrang Tahun 2019	40

Tabel 9 Banyaknya Tenaga Kesehatan Berdasarkan Kecamatan Di Kabupaten Pinrang Tahun 2019	42
Tabel 10 Dimensi, Indikator dan Indeks Dimensi Pembangunan Manusia	54
Tabel 11 Komoditi Kebutuhan Pokok Dasar Penghitungan Daya Beli	61
Tabel 12 Nilai Maksimum dan Minimum dari Setiap Komponen IPM.....	63
Tabel 13 Kriteria Tingkatan Status Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	66
Tabel 14 Indeks Pembentuk IPM Kabupaten Pinrang, 2015-2019 ..	67
Tabel 15 IPM Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan, Tahun 2019... 70	

Bab 1

Pendahuluan



<https://pinrangkab.bps.go.id>

5 eajatinya pembangunan di Indonesia sudah dilakukan dari jaman sebelum kemerdekaan walaupun pada saat itu pembangunan masih dikontrol oleh penjajah. Namun, pembangunan yang terstruktur dan berkesinambungan baru dimulai periode tahun 1970-an. Pembangunan diberbagai bidang terus dilakukan diantaranya di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan sebagainya. Berbagai pemberitaan tentang pembangunan di Indonesia terus di kabarkan ke pelosok negeri. Akan tetapi, apakah pembangunan yang selama ini telah mencerminkan pembangunan yang sebenarnya?

Pembangunan yang baik adalah pembangunan yang berorientasi pada manusia, artinya manusialah yang menjadi tujuan akhir dari pembangunan tersebut. Sejarah mencatat sampai tahun 1999 masih diterapkannya sistem sentralistik. Segala perencanaan sampai evaluasi pembangunan di Indonesia pun juga dilakukan secara terpusat. Namun, sejak diberlakukannya Undang-undang No. 2 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dan diperbaharui dengan Undang-undang No. 32 Tahun 2004, pembangunan dilakukan dengan sistem desentralisasi dimulai.

Sistem desentralisasi lebih dikenal dengan istilah otonomi daerah. Sistem ini menuntut pemerintah daerah lebih pro-aktif dalam upaya pembangunan sesuai dengan realitas yang ada yaitu

sesuai dengan kebutuhan daerahnya masing-masing dan tentunya mengutamakan kesejahteraan rakyat.

Dewasa ini dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan seluruh rakyat maka perencanaan pembangunan hendaknya tidak hanya mengedepankan pembangunan di bidang ekonomi ataupun pemenuhan sarana dan prasarana saja, melainkan juga harus melibatkan aspek manusia di dalamnya. Untuk dapat berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan dibutuhkan masyarakat Indonesia yang unggul dari segi SDA dan SDM-nya.

Pembangunan manusia adalah suatu proses untuk memperbanyak pilihan-pilihan yang dimiliki oleh manusia. Diantara banyak pilihan tersebut, pilihan yang terpenting adalah untuk berumur panjang dan sehat, untuk berilmu pengetahuan, dan untuk mempunyai akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan agar dapat hidup secara layak. Pembangunan manusia yang hakiki pada dasarnya ialah mampu menciptakan kebebasan. Kebebasan yang dimaksud ialah rakyat mampu memilih apa yang mereka inginkan dan mampu menjalani kehidupan secara mandiri.

Untuk menghindari kekeliruan dalam memaknai konsep di atas, perbedaan antara cara pandang pembangunan manusia terhadap pembangunan dengan pendekatan konvensional yang menekankan pertumbuhan ekonomi, pembentukan modal manusia, pembangunan sumber daya manusia, kesejahteraan rakyat, dan pemenuhan

kebutuhan dasar, perlu diperjelas. Konsep pembangunan manusia mempunyai cakupan yang lebih luas dari teori konvensional pembangunan ekonomi.

Model “pertumbuhan ekonomi” lebih menekankan pada peningkatan PNB daripada memperbaiki kualitas hidup manusia. “Pembangunan sumber daya manusia” cenderung untuk memperlakukan manusia sebagai input dari proses produksi sebagai alat, bukan sebagai tujuan akhir. Pendekatan “kesejahteraan” melihat manusia sebagai penerima dan bukan sebagai agen perubahan dalam proses pembangunan. Adapun pendekatan “kebutuhan dasar” terfokus pada penyediaan barang dan jasa untuk kelompok masyarakat tertinggal, bukannya memperluas pilihan yang dimiliki manusia di segala bidang.

Pendekatan pembangunan manusia menggabungkan aspek produksi dan distribusi komoditas, serta peningkatan dan pemanfaatan kemampuan manusia. Pembangunan manusia melihat secara bersamaan semua isu dalam masyarakat pertumbuhan ekonomi, perdagangan, ketenagakerjaan, kebebasan politik ataupun nilai-nilai kultural dari sudut pandang manusia. Pembangunan manusia juga mencakup isu penting lainnya, yaitu *gender*. Dengan demikian, pembangunan manusia tidak hanya memperhatikan sektor sosial, tetapi merupakan pendekatan yang komprehensif dari semua sektor. Pembangunan manusia merupakan perwujudan jangka panjang

yang meletakkan pembangunan di sekeliling manusia, dan bukan manusia di sekeliling pembangunan.

Isu yang hangat mengenai ekonomi Indonesia secara khusus maupun ASEAN secara umum adalah mulai diberlakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2017. Oleh karenanya kualitas manusia sangatlah penting disini sebagai modal dasar pembangunan dan menghadapi persaingan di era globalisasi. Pola pikir inilah yang harus dipegang untuk menempatkan manusia sebagai tujuan akhir pembangunan. Cara pandang inilah yang memungkinkan pemerintah dapat memenuhi hak-hak warga negara secara tepat.

Sumber daya manusia tidak hanya dilihat dari kuantitas tetapi juga harus diperhatikan aspek kualitas. Sejauh ini pemerintah telah melakukan berbagai usaha dalam usaha meningkatkan kualitas manusia Indonesia, melingkupi aspek kesehatan, pendidikan, pendapatan (daya beli) maupun aspek moralitas. Tak dipungkiri berbagai upaya tersebut semata-mata untuk mencapai tujuan utama yaitu menciptakan manusia Indonesia yang berkualitas.

1.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Menarik sejarah kebelakang yaitu sebelum tahun 1970-an, dalam upaya evaluasi pemerintah hanya melihat keberhasilan pembangunan berdasarkan pertumbuhan GNP baik secara total maupun perkapita. Memang benar terjadi peningkatan tetapi pada kenyataannya pertumbuhan dari keberhasilan pembangunan berbanding lurus dengan taraf hidup masyarakat. Oleh karena itu, dikarenakan kesadaran bahwa pembangunan bukan perkara mudah karena mencakup segi-segi kehidupan yang kompleks, maka diperlukan indikator yang dapat mencerminkan keberhasilan pembangunan manusia. Alat ukur inilah yang dikenal dengan IPM.

Konsep inilah yang digunakan untuk mengukur keberhasilan suatu negara maupun wilayah tertentu yang pembangunannya tidak hanya ditandai oleh tinggi rendahnya tingkat pertumbuhan ekonomi melainkan juga mencakup pula kualitas manusianya. Kondisi inilah yang menjadi tantangan semua pihak untuk menyelaraskan antara pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas manusia.

Secara sederhana IPM adalah indikator yang menjelaskan bagaimana penduduk/masyarakat dapat mengakses hasil-hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. Di dalam pembangunan manusia fokus utama pastilah manusia itu sendiri, oleh karenanya IPM bermanfaat

untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). Bahkan secara internasional, IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah atau negara. Terlebih khusus bagi negara Indonesia, IPM dijadikan data yang sangat amat strategis karena selain sebagai ukuran kinerja pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator bagi Dana Alokasi Umum (DAU) tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota.

Secara konseptual IPM adalah alat untuk mengukur pencapaian pembangunan manusia dari suatu wilayah yang terdiri dari tiga dimensi dasar pembangunan manusia, yaitu umur panjang dan hidup sehat (*long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*) serta standar hidup layak (*a decent standard of living*). Ketiganya diukur dengan angka harapan hidup, pencapaian pendidikan dan pendapatan per kapita yang telah disesuaikan menjadi paritas daya beli. IPM adalah suatu ringkasan dan bukan suatu ukuran komprehensif dari pembangunan manusia. Meskipun tidak mengukur semua dimensi dari pembangunan manusia, tetapi IPM dinilai mampu mengukur dimensi pokok dari pembangunan manusia.

Paradigma Pembangunan Manusia Terdiri dari 4 Komponen Utama:

1. *Produktivitas “Masyarakat harus dapat meningkatkan mereka dan berpartisipasi secara penuh dalam proses memperoleh penghasilan dan pekerjaan berupah. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi adalah salah satu bagian dari jenis pembangunan manusia”*
2. *Pemerataan “Masyarakat harus punya akses untuk memperoleh kesempatan yang adil. Semua hambatan terhadap peluang ekonomi dan politik harus dihapus agar masyarakat dapat berpartisipasi di dalam dan memperoleh manfaat dari kesempatan-kesempatan ini”*
3. *Kesinambungan “Akses untuk memperoleh kesempatan harus dipastikan tidak hanya untuk generasi sekarang tapi juga generasi yang akan datang. Segala bentuk pemodaln fisik, manusia, dan lingkungan hidup harus dilengkapi”*
4. *Pemberdayaan “Pembangunan harus dilakukan oleh masyarakat, dan bukan hanya untuk mereka. Masyarakat harus berpartisipasi penuh dalam mengambil keputusan dan proses-proses yang mempengaruhi kehidupan mereka”*

Sumber: Laporan Pembangunan Mansia Indonesia 1995

1.2 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Metode Baru

Pada tahun 2010, UNDP memperkenalkan penghitungan IPM dengan metode baru. Tahun 2011 dan 2014 dilakukan penyempurnaan metodologi IPM dan hasilnya pada tahun yang sama UNDP mencatat beberapa negara yang mengalami kemajuan tecepat dalam peningkatan IPM. Indonesia pada kurun waktu 1970-2010 termasuk dalam *World's Top Movers in HDI Improvement*. IPM Indonesia tahun 2013 sebesar 68,5 (kategori menengah) dan menduduki peringkat 108 dari 187 negara. Sedangkan tahun 2014 IPM Indonesia sebesar 68,4 persen dan menempati peringkat 110 dari 187 negara. Angka ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Akan tetapi peringkat Indonesia justru mengalami penurunan dikarenakan kenaikan IPM di negara-negara lain jauh lebih besar dibandingkan Indonesia.

Kenapa Harus Menggunakan IPM Metode Baru?

Alasan yang dijadikan dasar perubahan metodologi penghitungan IPM, ialah:

- ✓ Beberapa indikator sudah tidak tepat lagi digunakan dalam penghitungan IPM, Angka Melek Huruf (AMH) sudah tidak relevan dalam mengukur pendidikan secara utuh karena tidak dapat menggambarkan kualitas pendidikan seutuhnya. Selain

itu, karena AMH di sebagian besar daerah sudah tinggi, sehingga tidak dapat membedakan tingkat pendidikan antar daerah dengan baik.

- ✓ Indikator Rata-rata Lama Sekolah (RLS) untuk penduduk 15 tahun keatas dirasa sudah tidak relevan lagi karena hanya mengukur kemampuan rata-rata lama sekolah dalam lingkup tamat SMA saja.
- ✓ Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita tidak dapat menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah.
- ✓ Penggunaan rumus rata-rata aritmatik dalam penghitungan IPM menggambarkan bahwa capaian yang rendah disuatu dimensi dapat ditutupi oleh capaian yang tinggi pada dimensi lain.

Apa Saja Keunggulan IPM Metode Baru?

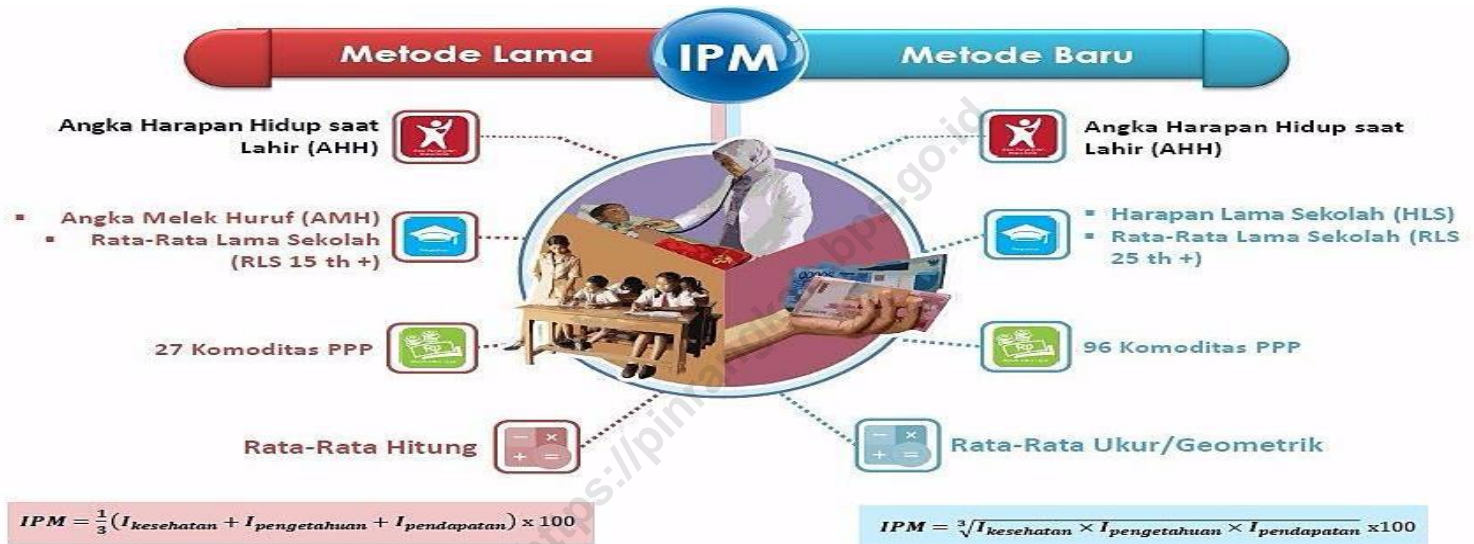
IPM metode baru menggunakan indikator yang lebih tepat dan dapat membedakan dengan baik (diskriminatif), yaitu dengan cara :

- Angka Melek Huruf (AMH) digantikan dengan indikator yang lebih sesuai dan tidak diskriminatif yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) sehingga didapatkan gambaran yang relevan dalam pendidikan dan perubahan yang terjadi;

- Rata-rata Lama Sekolah (RLS) menggunakan 25 tahun keatas, karena diharapkan mampu mencerminkan kemampuan rata-rata penduduk menyelesaikan pendidikan formalnya. Diasumsikan bahwa kondisi normal rata-rata sekolah suatu wilayah tidak akan turun.
- PNB menggantikan PDB karena lebih menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah.
- Capaian yang rendah pada suatu komponen tidak bisa ditutupi oleh komponen lain yang capaiannya lebih tinggi karena menggunakan rata-rata geometrik, artinya untuk mewujudkan pembangunan manusia yang baik, ketiga dimensi harus memperoleh perhatian yang sama karena sama pentingnya.

“Peningkatan pembangunan manusia hendaknya tidak hanya memfokuskan pada komponen penyusun IPM saja, namun jauh dari itu perlu dikaji dan dipertimbangkan indikator-indikator lain yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi peningkatan komponen-komponen dalam IPM. Fokus dalam perbaikan kesehatan dan pendidikan baik langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi taraf kesejahteraan masyarakat, oleh karena itu perlu tindakan secara menyeluruh untuk membentuk jg manusia yang berkualitas.”

<https://pinrangkab.bps.go.id>



Gambar 1 Diagram Hitung IPM

Bab 2

Variabel Terkait IPM



2.1 Kependudukan

Jumlah penduduk Kabupaten Pinrang terus menerus meningkat setiap tahun. Berdasarkan hasil proyeksi, penduduk Kabupaten Pinrang tercatat sebanyak 366.789 jiwa pada tahun 2015 meningkat menjadi 377.119 jiwa pada tahun 2019. Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Pinrang tahun 2019 sebesar 0,63 persen dengan kepadatan penduduk rata-rata adalah 192,23 jiwa per km².



Gambar 2 Persentase Penduduk Pinrang Menurut Kecamatan Tahun 2019

Jika dilihat dari jumlah penduduknya, pada tahun 2019 Kecamatan Watang Sawitto memiliki jumlah penduduk terbesar yaitu 56.713 jiwa. Selanjutnya, Kecamatan Duampanua dengan jumlah penduduk 46.358 jiwa.

Tabel 1 Persentase Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Pinrang Tahun 2018-2019

Kelompok Umur	2018			2019		
	L	P	L+P	L	P	L+P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
0 – 14	30,70	27,86	29,24	30,43	27,63	28,99
15 – 64	63,26	64,37	63,83	63,39	64,45	63,94
65 +	6,04	7,78	6,93	6,18	7,92	7,08
Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS Pinrang diolah

Seperti terlihat pada Tabel 1, komposisi penduduk di Kabupaten Pinrang didominasi oleh penduduk muda/dewasa. Pada tahun 2019, komposisi penduduk kelompok umur produktif (15-64 tahun) sebesar 63,94 persen, penduduk kelompok umur muda (0-14 tahun) sebesar 28,99 persen sementara penduduk kelompok umur tua (65+ tahun) sebesar 7,08 persen. Terlihat bahwa persentase penduduk kelompok umur 15-64 dan 65+ mengalami

peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, sedangkan persentase penduduk kelompok umur 0-14 tahun justru mengalami penurunan.

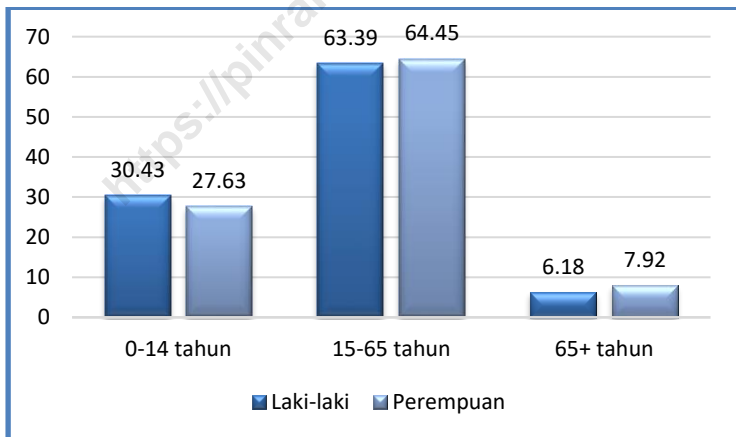
Persentase penduduk umur 15-64 tahun (63,94 persen) selama tahun 2019 lebih tinggi jika dibandingkan tahun 2018 (63,89 persen). Begitu juga pada kelompok umur 65 tahun ke atas, tahun 2019 (7,08 persen) lebih tinggi dari tahun 2018 (6,93 persen). Hal ini berarti bahwa semakin lama jumlah penduduk berumur produktif (15-64 tahun) semakin meningkat, begitu pula dengan jumlah penduduk berumur tua (65 tahun keatas).

Angka beban ketergantungan (*dependency ratio*) di Kabupaten Pinrang sebesar 57,75 persen. Hal ini berarti dari setiap 100 penduduk umur produktif menanggung/membiayai hidup sekitar 57 hingga 58 penduduk umur tidak produktif. Peningkatan angka beban ketergantungan dibandingkan tahun 2018 (56,66 persen) menyiratkan bahwa beban penduduk kelompok umur produktif pada tahun 2019 meningkat untuk membiayai penduduk tidak produktif.

Penduduk adalah aset yang berharga bila diarahkan dengan benar artinya perlu perencanaan yang tepat sesuai jenis kelamin. Jika dilihat secara umum, maka persentase penduduk perempuan di Kabupaten Pinrang lebih banyak dibandingkan persentase penduduk

laki-laki. Rasio jenis kelamin atau *sex ratio* penduduk Pinrang pada tahun 2019 adalah 94. Artinya, di setiap 100 orang penduduk perempuan, terdapat sekitar 94 penduduk laki-laki di Kabupaten Pinrang.

Berdasarkan gambar 3, terlihat bahwa persentase penduduk laki-laki berumur 0-14 tahun lebih tinggi (30,43 persen) daripada penduduk perempuan pada kelompok umur yang sama (27,63 persen). Sementara itu, pada kelompok umur 15-64 tahun dan 65 tahun keatas persentase penduduk perempuan justru lebih tinggi daripada penduduk laki-laki.



Gambar 3 Persentase Penduduk Kabupaten Pinrang Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2019

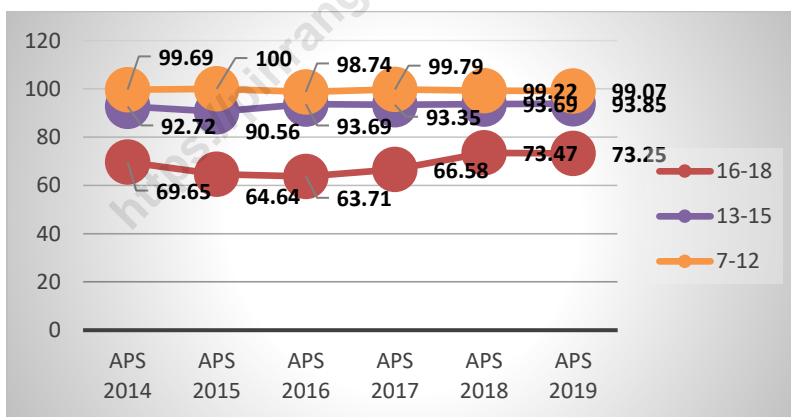
2.2 Pendidikan

Pembangunan yang diperlukan dewasa ini terletak pada aspek pendidikan. Berbagai upaya dilakukan untuk meningkatkan pendidikan. Akan tetapi, masih terdapat berbagai kendala, diantaranya adalah faktor kemiskinan, geografis dan budaya. Terkadang, bagi keluarga yang tidak mampu menyekolahkan anak di pendidikan formal, hal ini terasa begitu memberatkan. Walaupun sudah ada program pemerintah yang memudahkan tercapainya pendidikan untuk semua namun biaya pendidikan di luar sekolah formal masih sangat besar. Pola pikir inilah yang menyebabkan orang tua cenderung mengarahkan anaknya untuk bekerja dalam membantu perekonomian keluarga.

Selain itu, sebagian masyarakat menganggap bahwa pendidikan tidak akan menjamin perbaikan taraf hidup. Padahal, proses pendidikan tidak akan merubah taraf hidup secara instan karena proses di dalamnya yang akan membentuk kepribadian seseorang untuk dapat meningkatkan kualitas hidupnya. Secara ideal, dalam proses pembangunan cakupan pendidikan formal mengalami perluasan. Artinya, terjadi peningkatan kapabilitas dasar penduduk di bidang pendidikan. Program-program pemerintah seperti pemberantasan buta aksara, pemberian dana operasional

sekolah atau BOS, serta menjamin keberlangsungan program wajib belajar 9 tahun terus diselenggarakan.

Pemerataan akses terhadap pendidikan dapat dilihat dari Angka Partisipasi Sekolah (APS). Gambar 4 menunjukkan capaian APS dalam kurun waktu 6 tahun terakhir. Tahun 2019, APS pada kelompok umur 7-12 tahun tercatat 99,07 yang artinya dari setiap 100 anak berusia 7-12 tahun, terdapat 99 sampai 100 anak yang masih bersekolah dapat diartikan juga telah terjadi pemerataan kesempatan pendidikan untuk anak golongan umur 7-12 tahun. Angka ini menurun dibandingkan tahun 2018 yaitu 99,22.



Gambar 4 Angka Partisipasi Sekolah Kabupaten Pinrang 2014-2019

Sejalan dengan APS golongan umur 7-12 tahun di atas, pada tahun 2019 APS golongan umur 16-18 tahun sebesar 73,25 lebih

sedikit daripada APS tahun 2018 yaitu 73,47. Berlawanan untuk APS golongan umur 13-15 tahun, terjadi peningkatan APS dari tahun 2018 (93,69) menjadi 93,85 pada tahun 2019. Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 13-15 tahun capaiannya tidak secemerlang APS SD meskipun mengalami sedikit peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Pencapaian APS ini tentu tidak terlepas dari program-program pendidikan yang dicanangkan oleh pemerintah.

Pada tahun 2014 hingga 2016 APS golongan umur 16-18 tahun menunjukkan tren negatif. Akan tetapi pada tahun 2018 APS SMA meningkat cukup tinggi menjadi 73,47. Hal ini menunjukkan telah terjadi peningkatan performa dari setiap *stakeholder* baik pemerintah maupun masyarakat umum dalam upaya pemenuhan pendidikan di taraf SMA. Pada tahun 2019 APS golongan umur 16-18 mengalami penurunan menjadi 73,25 dibanding tahun sebelumnya. Meskipun demikian, diharapkan pada tahun-tahun mendatang khususnya pemerintah dapat terus memacu berbagai pihak agar lebih mempermudah masyarakat umum untuk mengenyam pendidikan SMA.

Perlu disadari bahwa jenjang SMA adalah pintu gerbang untuk dapat melanjutkan pendidikan ke lebih tinggi atau dewasa ini dijadikan syarat minimal untuk bekerja pada level terendah, oleh karena itu perlu ditingkatkan lagi skema peningkatan angka

partisipasi sekolah contohnya dengan diperbanyak beasiswa bagi masyarakat tidak mampu dan perlu dilakukan konseling pendidikan lebih intensif.

Permasalahan klasik dalam dunia pendidikan dan tentunya menghambat tercapainya kapabilitas dasar penduduk di bidang pendidikan adalah mahalnya biaya pendidikan. Pendidikan tidak dapat memberikan keuntungan langsung secara ekonomi sedangkan semakin mahalnya biaya pendidikan bagi sebagian masyarakat berdampak pada pilihan untuk tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi atau menamatkan pendidikan yang sedang dijalani (putus sekolah).

Mengingat pentingnya pendidikan maka perhitungan IPM menggunakan salah satu komponen pembentuk dari dimensi pengetahuan yang diukur melalui tingkat pendidikan. Dalam penghitungan IPM metode baru indikator yang digunakan adalah Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Berawal tahun 1984 pemerintah mencanangkan gerakan wajib belajar untuk anak umur 7-12 tahun. Selain bertujuan untuk mereduksi persentase penduduk yang tidak tamat SD, secara implisit kebijakan ini juga menegaskan bahwa pendidikan SD merupakan suatu kebutuhan dasar bagi setiap penduduk. Sejalan dengan tuntutan global, pemerintah juga menuangkan kebijaksanaan

pengembangan SDM dalam Garis Besar Haluan Negara (GBHN) 1993, selanjutnya pada tanggal 2 Mei 1994, pemerintah mencanangkan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun. Dengan kata lain, pendidikan SMP sudah dianggap sebagai kebutuhan dasar setiap penduduk.

Jika harus membandingkan dengan capaian SDG's (Sustainable Development Goal's) atau kelanjutan MDG's (Millenium Development Goal's) yang salah satu tujuannya adalah pendidikan dasar untuk semua maka kondisi tahun 2019 di Kabupaten Pinrang hanya pada tahap level SD saja yang telah memenuhi kriteria SDG's dan diharapkan tidak hanya pada level SD di Kabupaten Pinrang bisa mencapai APS 100 tetapi juga pada jenjang berikutnya SMP dan SMA, tentunya dengan kerja keras dari seluruh pihak yang berkepentingan.

Berdasarkan data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pinrang untuk tahun ajaran 2018/2019, pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Pinrang tercatat sebanyak 323 sekolah, dengan jumlah guru sebanyak 3.061 orang dan jumlah murid sebanyak 41.199 orang. Kondisi di Kabupaten Pinrang Tahun Ajaran 2018/2019 pada jenjang pendidikan SD, seorang guru (baik guru tetap/PNS maupun Honorer) rata-rata mengajar 13-14 orang murid, dengan kemampuan daya tampung

sekolah mencapai 127-128 orang murid. Daya tampung sekolah tahun 2018/2019 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2017/2018 karena peningkatan jumlah penduduk usia sekolah SD lebih besar dibandingkan peningkatan jumlah sekolah.

Tabel 2 Banyaknya Sekolah, Guru, Murid Tingkat Pendidikan SD Menurut Kecamatan di Kabupaten Pinrang Tahun Ajaran 2018/2019

Kecamatan	Sekolah	Murid	Guru	Rasio murid-guru
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Suppa	27	3188	234	13,62
Mattiro Sompe	24	2878	199	14,46
Lanrisang	19	1729	146	11,84
Mattiro Bulu	26	2824	267	10,58
Watang Sawitto	32	6306	401	15,73
Paleteang	24	4095	298	13,74
Tiroang	19	2523	199	12,68
Patampanua	32	3652	304	12,01
Cempa	19	2041	149	13,70
Duampanua	40	5203	362	14,37
Batulappa	14	1212	109	11,12
Lembang	47	5548	393	14,12
Pinrang	323	41199	3061	13,46

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pinrang

Tabel 3 Banyaknya Sekolah, Guru, Murid Tingkat Pendidikan MI Menurut Kecamatan di Kabupaten Pinrang Tahun Ajaran 2018/2019

Kecamatan	Sekolah	Murid	Guru	Rasio murid-guru
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Suppa	2	404	40	10,10
Mattiro Sompe	4	360	42	8,57
Lanrisang	3	235	52	4,52
Mattiro Bulu	3	285	37	7,70
Watang Sawitto	4	448	47	9,53
Paleteang	1	94	16	5,88
Tiroang	0	0	0	0,00
Patampanua	4	473	48	9,85
Cempa	0	0	0	0,00
Duampanua	4	352	45	7,82
Batulappa	2	198	23	8,61
Lembang	2	170	19	8,95
Pinrang	29	3019	369	8,18

Sumber : Kementerian Agama Kabupaten Pinrang

Untuk pendidikan Madrasah Ibtidaiyah (MI) di Kabupaten Pinrang tercatat berjumlah 29 madrasah, 369 guru dan 3.019 murid. Kondisi ini menunjukkan bahwa rata-rata guru di MI mengajar 8-9 orang murid, dengan kemampuan daya tampung sekolah mencapai 104-105 orang murid.

Tabel 4 Banyaknya Sekolah, Guru, Murid Tingkat Pendidikan SMP Menurut Kecamatan di Kabupaten Pinrang Tahun Ajaran 2018/2019

Kecamatan	Sekolah	Murid	Guru	Rasio murid-guru
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Suppa	4	1192	91	13,10
Mattiro Sompe	3	1167	77	15,16
Lanrisang	2	480	31	15,48
Mattiro Bulu	4	1338	102	13,12
Watang Sawitto	7	3115	214	14,56
Paleteang	3	1359	93	14,61
Tiroang	4	900	80	11,25
Patampanua	5	1488	141	10,55
Cempa	3	917	76	12,07
Duampanua	7	2030	156	13,01
Batulappa	4	364	49	7,43
Lembang	11	2178	161	13,53
Pinrang	57	16528	1271	13,00

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pinrang

Sementara pada jenjang pendidikan SMP tercatat jumlah sekolah sebanyak 57 unit, guru sebanyak 1.271 orang dan murid sebanyak 16.528 orang. Pada jenjang ini, seorang guru baik tetap PNS maupun honorer rata-rata mengajar 13 orang murid, dengan kemampuan daya tampung sekolah mencapai 289-290 orang murid.

Berikutnya pada jenjang pendidikan madrasah MTs tercatat jumlah madrasah sebanyak 22 unit, guru sebanyak 427 orang dan murid sebanyak 2.973 orang. Pada jenjang ini, seorang guru baik tetap PNS maupun honorer rata-rata mengajar 6-7 orang murid, dengan kemampuan daya tampung sekolah mencapai 135-136 orang murid.

Tabel 5 Banyaknya Sekolah, Guru, Murid Tingkat Pendidikan MTs Menurut Kecamatan di Kabupaten Pinrang Tahun Ajaran 2018/2019

Kecamatan	Sekolah	Murid	Guru	Rasio murid-guru
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Suppa	1	400	37	10,81
Mattiro Sompe	1	250	26	9,62
Lanrisang	3	320	59	5,42
Mattiro Bulu	1	139	25	5,56
Watang Sawitto	2	95	23	4,13
Paleteang	4	820	83	9,88
Tiroang	0	0	0	0,00
Patampanua	2	146	30	4,87
Cempa	1	38	14	2,71
Duampanua	4	410	82	5,00
Batulappa	2	179	32	5,59
Lembang	1	176	16	11,00
Pinrang	22	2973	427	6,96

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pinrang

Apabila dikaitkan dengan program wajib belajar 9 tahun, maka anak umur 7-15 tahun harus mengikuti program pendidikan.

Upaya pemerintah untuk meningkatkan partisipasi sekolah melalui program wajib belajar 9 tahun begitu gencarnya. Hal ini menunjukkan kemampuan daya serap sekolah dasar maupun sekolah menengah pertama di Pinrang relatif perlu ditingkatkan. Tetapi perlu diingat bahwa harapan dan target yang sebenarnya ingin dicapai adalah agar tidak ada lagi anak umur 7-15 tahun yang tidak bersekolah.

Keberhasilan pembangunan suatu bangsa sangat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan penduduknya. Pendidikan merupakan pembentuk watak bangsa di segala bidang kehidupan, khususnya dalam meningkatkan mutu sumber daya manusia. Upaya untuk mencapai tujuan tersebut adalah dengan meningkatkan kualitas tenaga pendidik di berbagai bidang ilmu pengetahuan serta penyediaan sarana dan prasarana pendidikan. Selain itu, hendaknya perlu juga didukung dengan akses yang mudah menuju fasilitas pendidikan dan beasiswa bagi siswa yang kurang mampu.

Berdasarkan tabel 6, tercatat jumlah sekolah SMA/SMK sebanyak 31 sekolah, guru sebanyak 982 orang dan murid sebanyak 15.803 orang. Pada jenjang ini, seorang guru rata-rata mengajar 16-17 orang murid, dengan kemampuan daya tampung sekolah rata-rata mencapai 509-510 murid.

Tabel 6 Banyaknya Sekolah, Guru, Murid Tingkat Pendidikan SMA/SMK Menurut Kecamatan di Kabupaten Pinrang Tahun Ajaran 2018/2019

Kecamatan	Sekolah	Murid	Guru	Rasio murid-guru
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Suppa	2	890	67	13,28
Mattiro Sompe	1	854	45	18,98
Lanrisang	1	388	23	16,87
Mattiro Bulu	2	1557	101	15,42
Watang Sawitto	8	5678	302	18,80
Paleteang	5	812	82	9,90
Tiroang	2	743	51	0,00
Patampanua	2	1221	83	14,71
Cempa	1	415	29	14,31
Duampanua	4	1641	111	14,78
Batulappa	1	159	19	0,00
Lembang	2	1445	69	20,94
Pinrang	31	15803	982	16,09

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pinrang

Tabel 7 menunjukkan data pada jenjang pendidikan MA. Dengan jumlah madrasah MA sebanyak 8 madrasah, guru sebanyak 186 orang dan murid sebanyak 1.615 orang. Pada jenjang ini, seorang guru rata-rata mengajar 8-9 orang murid, dengan kemampuan sekolah rata-rata mencapai 201-202 orang murid.

Tabel 7 Banyaknya Sekolah, Guru, Murid Tingkat Pendidikan MA Menurut Kecamatan di Kabupaten Pinrang Tahun Ajaran 2018/2019

Kecamatan	Sekolah	Murid	Guru	Rasio murid-guru
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Suppa	1	47	14	3,36
Mattiro Sompe	1	91	16	5,69
Lanrisang	2	151	31	4,87
Mattiro Bulu	1	99	22	4,50
Watang Sawitto	0	0	0	0,00
Paleteang	2	1097	80	13,71
Tiroang	0	0	0	0,00
Patampanua	0	0	0	0,00
Cempa	0	0	0	0,00
Duampanua	1	130	23	5,65
Batulappa	0	0	0	0,00
Lembang	0	0	0	0,00
Pinrang	8	1615	186	8,68

Sumber: Kementerian Agama Kabupaten Pinrang

Jika diamati secara seksama, terlihat bahwa minat masyarakat akan sekolah MI, MTs, maupun MA tergolong lebih rendah dibandingkan sekolah konvensional, yaitu SD, SMP dan SMA baik negeri maupun swasta. Sehingga hal ini mempengaruhi pula jumlah murid serta guru di tiap jenjang pendidikan.

Pendidikan agama di sekolah sebenarnya memiliki andil besar menjadi penentu pembentukan watak dan karakter manusia

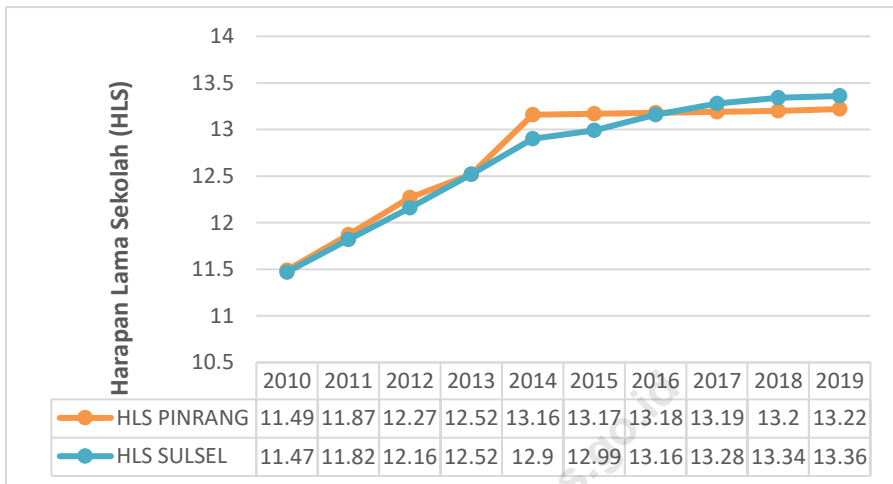
terutama dari segi akhlak. Akan tetapi, mayoritas orang tua menganggap bahwa sekolah berbasis agama akan memberatkan anak dari segi kuantitas yang dipelajari dengan waktu belajar yang sama dengan sekolah konvensional. Selain itu stigma bahwa pendidikan berbasis agama adalah pendidikan kelas dua juga sering dielukan masyarakat umum yang menganggap terbelakang, sulit dan tidak bermutu.

Sekolah berbasis agama seperti MI, MTs, dan MA selayaknya perlu mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah agar masyarakat lebih cenderung bersekolah disana. Hal ini karena dewasa ini telah muncul sekolah-sekolah berbasis agama yang bermutu dan justru menjadi sekolah unggulan. Bahkan turut mengantarkan para muridnya mencapai prestasi yang memuaskan baik ditingkat nasional maupun internasional. Oleh karena itu perlu kerja keras untuk menggaungkan madrasah sebagai lembaga pendidikan bermutu sekaligus wadah untuk membentuk watak islami pada anak-anak.

2.2.1 Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah

Penghitungan IPM metode baru tidak lagi menggunakan Angka Melek Huruf (AMH) sebagai salah satu sistem pendidikan. Akan tetapi, menggunakan Harapan Lama Sekolah (HLS). Melek huruf tidak lagi digunakan karena tidak dapat membedakan tingkat pendidikan antar daerah dengan baik (angka melek huruf sebagian daerah sudah tinggi). Sebagai gantinya digunakan Harapan Lama Sekolah (HLS) karena diharapkan menggambarkan aspek pengetahuan (knowledge) dalam pembangunan manusia secara nyata.

Harapan Lama Sekolah (HLS) adalah lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu dimasa mendatang. HLS diperoleh dengan asumsi bahwa kemungkinan anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan rasio penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama pada saat ini. Harapan Lama Sekolah yang digunakan adalah untuk penduduk umur tujuh tahun ke atas. Kegunaan HLS untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.



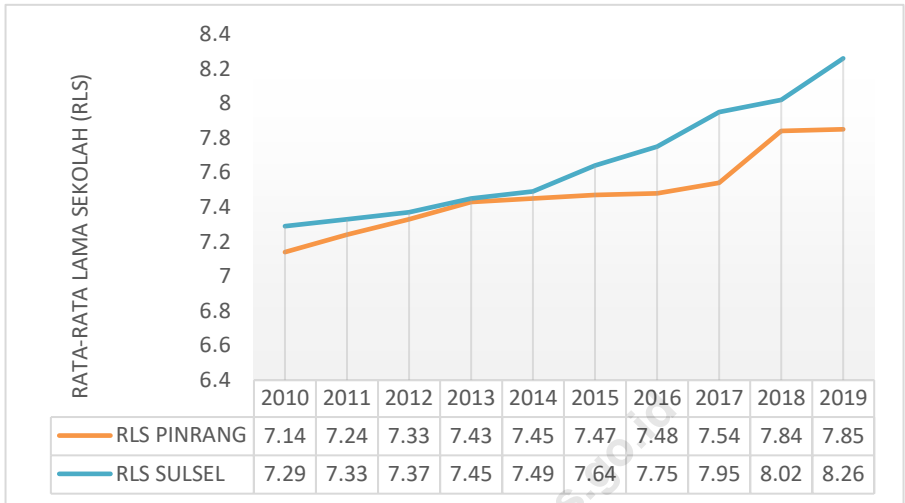
Gambar 5 Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Pinrang dan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010-2019

Berdasarkan Gambar 5 Harapan Lama Sekolah (HLS) penduduk umur 8 tahun ke atas Kabupaten Pinrang memperlihatkan tren yang meningkat selama 9 tahun terakhir. HLS Kabupaten Pinrang tahun 2019 adalah 13,22 tahun. Sejak 6 tahun belakangan dari tahun 2014 HLS Kabupaten Pinrang nyaris stabil di angka 13 tahun. HLS Kabupaten Pinrang pada tahun 2019 masih berada di bawah angka HLS Provinsi Sulawesi Selatan. Dibandingkan dengan seluruh kabupaten se-provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Pinrang memiliki angka harapan lama sekolah ranking ke 13 tertinggi.

Selain HLS, indikator lain untuk menggambarkan dimensi pengetahuan pada pembangunan manusia adalah Rata-rata Lama Sekolah. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) didefinisikan sebagai jumlah

tahun yang digunakan penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Untuk rata-rata lama sekolah, populasi yang digunakan adalah penduduk berumur 25 tahun keatas karena diasumsikan bahwa pada umur 25 tahun proses pendidikan sudah berakhir.

Gambar 6. menyajikan angka RLS penduduk Pinrang dan Provinsi Sulawesi Selatan kurun waktu tahun 2010-2019. Rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Pinrang tahun 2010 sebesar 7,38 tahun, dan terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2019 rata-rata lama sekolah Kabupaten Pinrang sebesar 7,85 yang sebelumnya 7,84 pada tahun 2018. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata penduduk yang bersekolah di Pinrang hanya mampu menyelesaikan sekolah sampai dengan kelas 1-2 SMP. Untuk RLS terlihat secara umum Kabupaten Pinrang masih dibawah rata-rata Provinsi Sulawesi Selatan kurun waktu 2010-2019, hal ini mengindikasikan perlunya peningkatan terhadap akses pendidikan yang lebih merata tidak hanya berfokus dipusat kota saja tetapi juga untuk daerah sulit, dipinggiran kota ataupun kecamatan terpencil.



Gambar 6 Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Penduduk Umur 25 Tahun Keatas Kabupaten Pinrang dan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010-2019

Dari angka-angka yang ditampilkan diatas tampak disatu sisi terdapat prestasi tersendiri yaitu meningkatnya HLS. Namun disisi lain RLS masih lebih rendah jika dibandingkan angka provinsi. Kondisi ini mencerminkan bahwa sekalipun angka HLS menunjukkan tren yang baik namun RLS masih dibawah rata-rata. Sehingga perlu upaya yang lebih maksimal lagi untuk menyelaraskan antara HLS yang tinggi dengan kenyataan sesungguhnya bahwa RLS masih lebih rendah dari rata- rata provinsi.

2.3 Kesehatan

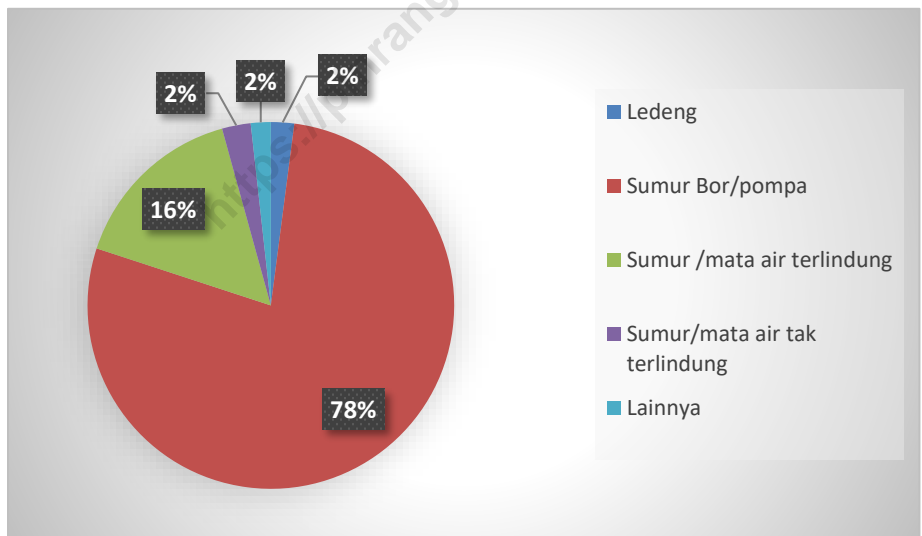
Salah satu upaya dalam peningkatan mutu SDM adalah melalui peningkatan kualitas hidup manusia dari segi kesehatan. Perlu disadari, selain pendidikan, aspek kesehatan tak kalah pentingnya sebagai salah satu pilar dalam pembangunan manusia. Sehingga sudah sepantasnyalah pemerintah dapat lebih meningkatkan fasilitas kesehatan sehingga derajat kesehatan masyarakat dapat meningkat.

Seiring terjadinya peningkatan derajat kesehatan masyarakat, salah satu indikator yang dapat diukur adalah angka morbiditas. Penduduk yang mengalami morbiditas adalah penduduk yang mengalami keluhan kesehatan dan menyebabkan gangguan dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Berdasarkan data Susenas, angka morbiditas Kabupaten Pinrang sebesar 16,04 persen pada tahun 2019, angka ini menunjukkan terjadi peningkatan kualitas kesehatan yang cukup signifikan pada penduduk Kabupaten Pinrang dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 35,28 persen.

Sementara itu tingkat morbiditas dipengaruhi oleh beberapa faktor penentu diantaranya faktor lingkungan, perilaku kesehatan, pelayanan kesehatan dan kependudukan/keturunan. Dalam konsep derajat kesehatan, faktor terbesar yang memengaruhi derajat kesehatan seseorang adalah faktor lingkungan. Konsep ini

menyatakan bahwa lingkungan yang baik akan mendorong secara langsung peningkatan derajat kesehatan.

Melalui program *MDG's*, pemerintah Indonesia telah menetapkan indikator sanitasi layak sebagai salah satu target dalam tujuan ketujuh yaitu menjamin kelestarian lingkungan hidup. Sanitasi layak adalah fasilitas sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan yaitu dilengkapi dengan kloset leher angsa dan terdapatnya pembuangan akhir tinja berupa tanki/spal. Pada tahun 2019 fasilitas BAB layak yakni terdapatnya pembuangan akhir tinja berupa tanki/spal di Kabupaten Pinrang adalah sebesar 99,38 persen.



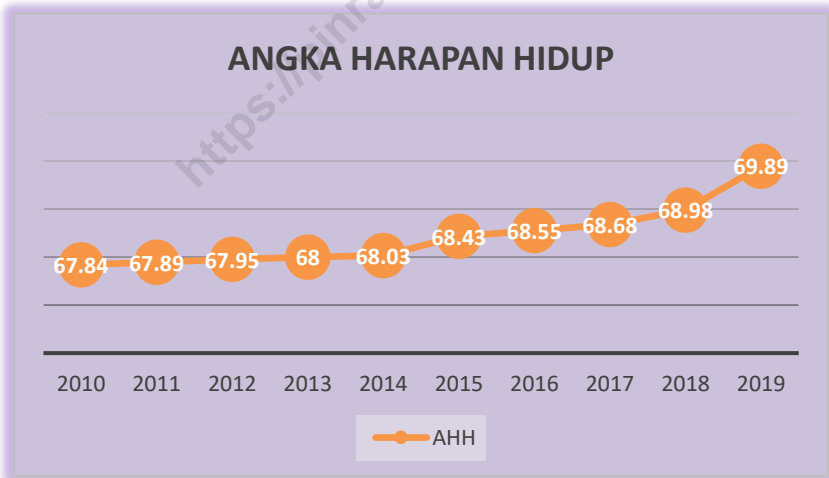
Gambar 7. Persentase rumah tangga menurut sumber air utama untuk mandi/cuci/dll, 2019

Di Kabupaten Pinrang pada tahun 2019 sebanyak 78 persen rumah tangga yang menggunakan sumur bor/pompa untuk mandi/cuci/dll. Selain itu terdapat pula rumah tangga yang menggunakan sumur/mata air terlindung sebanyak 16 persen. Selebihnya yakni sekitar 2 persen rumah tangga menggunakan air ledeng, sumur/mata air tak terlindung, dan lainnya untuk mandi/cuci/dll.

Indikator-indikator diatas akan mempengaruhi kualitas pembangunan manusia di suatu daerah. Oleh karenanya perlu diperhatikan indikator lain selain komponen IPM yang ada, karena derajat kesehatan dipengaruhi oleh banyak indikator dasar dan diharapkan pembangunan dimulai dari indikator dasar tersebut. Jika dikaitkan dengan tingkat morbiditas yang mengalami peningkatan maka tetap perlu upaya peningkatan dari segi kualitas kebersihannya.

2.3.1 Harapan Hidup

Salah satu komponen dalam penghitungan IPM adalah Angka Harapan Hidup (AHH). Kemampuan untuk hidup lebih lama diukur dengan indikator harapan hidup pada saat lahir. Pencapaian angka harapan hidup penduduk Kabupaten Pinrang dari tahun ke tahun memperlihatkan garis yang selalu meningkat signifikan (lihat gambar 9). Peningkatan yang cukup tajam terjadi pada tahun 2015, yaitu naik hampir 0.5. Sementara itu, AHH tahun 2019 Kabupaten Pinrang adalah sebesar 69,89. Angka tersebut berarti bahwa penduduk Kabupaten Pinrang ketika lahir diharapkan akan mampu bertahan hidup hingga 69-70 tahun ke depan.



Gambar 8 Angka Harapan Hidup Penduduk Kabupaten Pinrang Tahun 2010-2019

Kondisi AHH tidak berdiri sendiri melainkan memiliki keterkaitan dengan variabel kesehatan lainnya. Seperti dijelaskan sebelumnya, kondisi lingkungan dan pelayanan kesehatan memiliki keterkaitan terhadap kualitas angka harapan hidup. Selanjutnya dijelaskan beberapa variabel yang memiliki keterkaitan terhadap AHH, antara lain angka kematian bayi, angka kematian balita, angka kematian ibu dan yang tak kalah pentingnya adalah status gizi baik anak-anak maupun kelompok ibu-ibu umur 15-49 tahun. Mengingat besarnya resiko seorang ibu dalam melahirkan seorang anak, maka sangat diperlukan adanya kemudahan untuk akses ke pelayanan kesehatan terutama pada saat kelahiran dengan resiko tinggi.

Tabel 8 Banyaknya Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Pinrang Tahun 2019

Uraian	Jumlah
(1)	(4)
Rumah sakit	4
Puskesmas	17
Balai Pengobatan	6
Rumah Bersalin	0
Polindes	4
Posyandu	368
Jumlah	399

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Pinrang

Dari Tabel 8 di atas terlihat bahwa pembangunan sarana kesehatan di Kabupaten Pinrang cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari adanya rumah sakit maupun sarana kesehatan lainnya. Sehingga, masyarakat memiliki alternatif berobat yang lebih baik fasilitasnya. Keberadaan Puskesmas maupun Puskesmas Pembantu (Pustu) di Kabupaten Pinrang yang berada di seluruh kecamatan bahkan kelurahan maupun desa, dirasa sangat membantu masyarakat untuk bisa berobat yang relatif dekat, murah dan berkualitas.

Puskesmas atau Pustu adalah fasilitas kesehatan terdepan di masyarakat artinya masyarakat akan lebih mudah mendapatkan fasilitas kesehatan di lingkungan tinggalnya tanpa harus jauh meninggalkan desa/kecamatannya. Rasio penduduk terhadap puskesmas yang dibantu oleh Polindes dan Posyandu di Kabupaten Pinrang pada tahun 2019 sebesar 1 : 941,16 yang artinya satu puskesmas yang dibantu Polindes dan Posyandu harus melayani sekitar 941-942 penduduk. Rasio ini menunjukkan bahwa beban Puskesmas maupun pustu sangat besar karena harus melayani kesehatan penduduk yang hampir seribu penduduk. Oleh karena itu, keberadaan Puskesmas, Polindes dan Posyandu perlu diperbanyak lagi agar pelayanan kesehatan terhadap masyarakat lebih optimal.

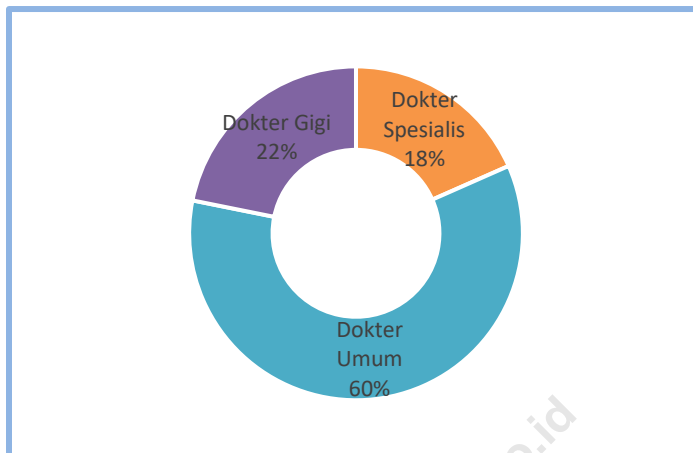
Jika dilihat dari jumlah tenaga medisnya, pada tahun 2019, di Kabupaten Pinrang terdapat 185 bidan, 294 perawat, dan 34

tenaga farmasi masyarakat. Total seluruh tenaga kesehatan mencapai 530 orang. Rasio bidan terhadap penduduk sebesar 1:2.038, artinya satu bidan harus melayani sekitar 2.038 penduduk. Rasio penduduk terhadap perawat pada tahun 2019 sebesar 1:1.282, artinya satu perawat harus mampu merawat 1.282 penduduk.

Tabel 9 Banyaknya Tenaga Kesehatan Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Pinrang Tahun 2019

Kecamatan	Tenaga kesehatan				Jumlah
	Perawat	Bidan	Farmasi	Ahli gizi	
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Suppa	14	12	0	0	26
Mattiro Sompe	12	12	1	0	25
Lanrisang	11	12	1	1	25
Mattiro Bulu	16	17	0	2	35
Watang Sawitto	158	34	30	9	231
Paleteang	6	10	0	0	16
Tiroang	5	11	1	1	18
Patampanua	17	21	0	3	41
Cempa	12	13	0	0	25
Duampanua	25	22	1	0	48
Batulappa	5	10	0	0	15
Lembang	13	11	0	1	25
Total	294	185	34	17	530

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pinrang



Gambar 9 Banyaknya Dokter Spesialis, Dokter Umum dan Dokter Gigi di Kabupaten Pinrang Tahun 2019

Gambar 10 menunjukkan di Kabupaten Pinrang tahun 2019 memiliki jumlah dokter umum 52 orang, 19 dokter gigi dan 16 dokter spesialis. Rasio penduduk terhadap dokter pada tahun 2019 sebesar 1:4.334 artinya satu dokter umum harus melayani sekitar empat ribu tiga ratus tiga puluh empat penduduk. Hal ini berarti jumlah dokter di Kabupaten Pinrang masih harus sangat ditingkatkan karena pertumbuhan penduduk berjalan sangat cepat, sementara penambahan jumlah tenaga medis tidak sebanding.

2.3.2 Keluarga Berencana

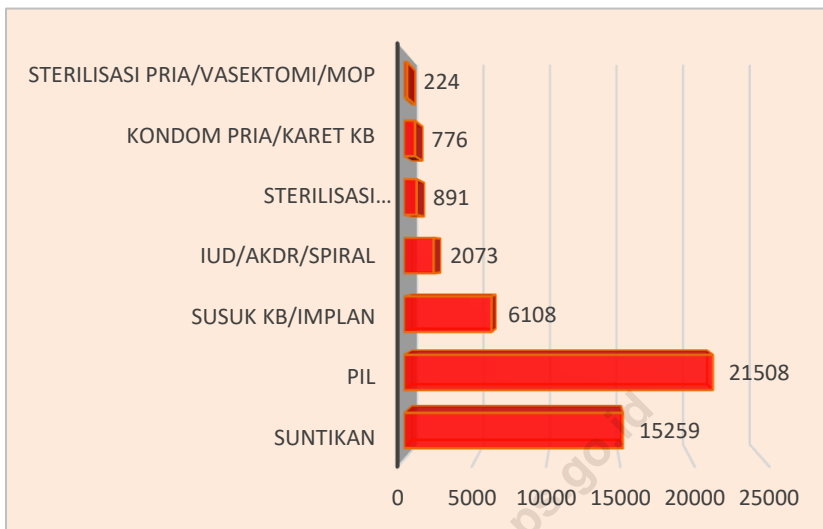
Program KB adalah program yang secara khusus dimaksudkan sebagai upaya penanggulangan laju pertumbuhan penduduk alami, yaitu melalui pembatasan dan pengaturan jarak kelahiran. Memiliki pengetahuan tentang pengendalian kelahiran dan keluarga berencana penting agar dapat memahami tentang berbagai alat/cara kontrasepsi, serta pemakaian alat/cara KB yang tepat dan efektif.

Tingginya angka pemakaian alat kontrasepsi oleh pasangan usia subur (PUS) dapat menggambarkan tingginya tingkat kesadaran masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam pelaksanaan program pemerintah dalam rangka mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera. Tinggi rendahnya partisipasi masyarakat terhadap program keluarga berencana dapat disebabkan oleh berbagai faktor, diantaranya alasan fertilitas, adat kebiasaan/faham keagamaan, pengetahuan tentang alat/cara KB yang sesuai, biaya yang relatif mahal atau akses ke tempat pelayanan KB yang sulit terjangkau, atau alasan lainnya yang menyebabkan seseorang berpartisipasi atau tidak dalam program keluarga berencana.

Angka prevalensi pemakaian kontrasepsi adalah angka yang menunjukkan banyaknya PUS yang sedang memakai kontrasepsi pada

saat pencacahan dibandingkan dengan seluruh PUS. Angka prevalensi kontrasepsi ini sering disebut dengan CPR (*Contraceptive Prevalence Rate*). Informasi tentang besarnya CPR sangat bermanfaat untuk menetapkan kebijakan pengendalian kependudukan, serta penyediaan pelayanan KB, baik dalam bentuk mempersiapkan pelayanan kontrasepsi seperti sterilisasi, pemasangan IUD, persiapan alat dan obat kontrasepsi, maupun pelayanan konseling untuk menampung kebutuhan dan menanggapi keluhan pemakaian kontrasepsi.

Alat/cara KB ada tiga macam, yaitu cara modern, alamiah, dan cara tradisional. Alat/cara KB modern dapat bersifat kimia (suntikan, pil, dan susuk) dan dapat bersifat non-kimia (spiral, kondom, dan sterilisasi). Cara KB alamiah (*natural family planning methods*) antara lain meliputi sistem kalender, pantang berkala, dan senggama terputus. Cara tradisional meliputi penggunaan ramu-ramuan tradisional yang dipercayai mempunyai khasiat mencegah kehamilan.



Gambar 10 Jumlah peserta KB Aktif Menurut Jenis Alat KB, Tahun 2019

Bagi penduduk yang sedang ber-KB, metode kontrasepsi yang paling banyak digunakan oleh masyarakat Pinrang adalah pil KB sebanyak 21.508 orang. Kemudian suntikan KB sebanyak 15.259 orang, susuk KB/norplan sebesar 6.108 orang, IUD/spiral 2.073 orang dan tercatat 891 orang melakukan sterilisasi, selebihnya lainnya.

2.3.3 Pemberian ASI

Hal yang tak kalah penting dalam peningkatan kualitas SDM adalah pemberian Air Susu Ibu (ASI) untuk bayi berumur dibawah 5 tahun (balita). ASI adalah makanan terbaik dan paling penting bagi

seorang bayi. Secara alami, baik kandungan gizi maupun imun/zat kekebalan tubuh pada ASI telah memenuhi seluruh kebutuhan bayi dalam jangka waktu enam bulan. Bahkan *UNICEF* telah menyatakan kepeduliannya terhadap perlunya untuk meningkatkan penggunaan ASI.

Hasil Susenas 2019 menunjukkan bahwa rata-rata lama pemberian ASI untuk bayi 0-23 bulan di Kabupaten Pinrang adalah 10 bulan. Hal tersebut berarti kesadaran masyarakat akan pemberian ASI selama 2 tahun di Kabupaten Pinrang tergolong masih kurang. Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya ASI masih sangat perlu ditingkatkan.

2.4 Pengeluaran Perkapita

Salah satu aspek pokok dalam permasalahan pembangunan adalah kemiskinan. Kemiskinan dapat diartikan sebagai ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar yaitu makanan dan non makanan yang diukur berdasarkan garis kemiskinan. Kemiskinan diyakini disebabkan beberapa faktor yang bersifat multi aspek, kemiskinan menjadikan seseorang kehilangan kesempatan untuk meningkatkan potensi dirinya.

Salah satu penyebab kemiskinan adalah faktor pengangguran. Ketidakmampuan memperoleh pendapatan yang

dikarenakan tidak bekerja adalah masalah besar yang dihadapi hampir di setiap wilayah. Di Kabupaten Pinrang sendiri, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menunjukkan pergerakan yang fluktuatif selama kurun waktu tahun 2008-2019.



Gambar 11 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Pinrang Tahun 2008-2019

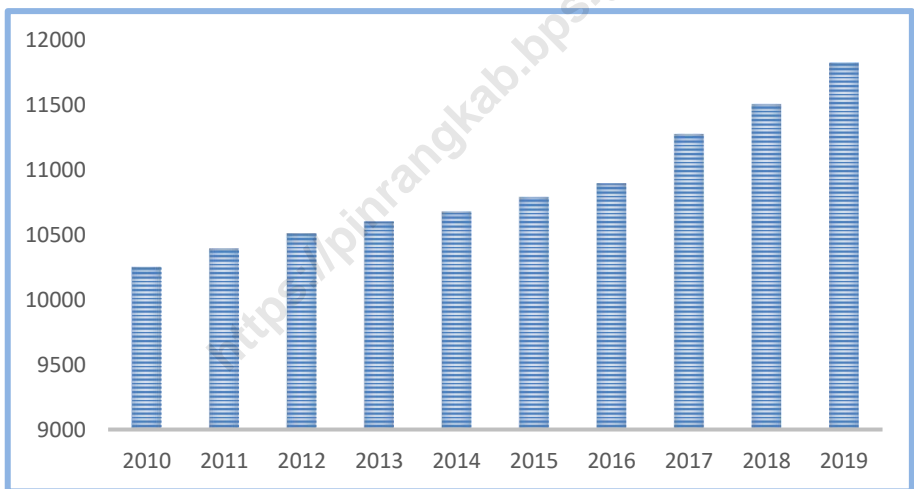
Gambar 15 menunjukkan semenjak 2008 hingga 2013, TPT terus menunjukkan tren penurunan jumlah pengangguran. TPT Kabupaten Pinrang pernah berada pada posisi 10,88 persen pada tahun 2008 dan mengalami penurunan luar biasa pada tahun 2013 yang hanya menyisakan 1,96 persen saja. Namun pada tahun 2015 terjadi peningkatan TPT menjadi 4,85 persen atau naik hampir dua kali lipat jika dibandingkan dengan kondisi tahun 2014 yang hanya

mencapai 2,78 persen. Akan tetapi pada tahun 2018, TPT Kabupaten Pinrang kembali menurun menjadi 3,03 persen. Pada tahun 2019 TPT Kabupaten Pinrang kembali meningkat menjadi 3,10 persen. Kondisi ini hendaknya menjadi perhatian khusus agar kedepan hak setiap warga negara untuk mendapatkan pekerjaan dapat dipenuhi.

Selanjutnya, dalam perkembangan kesejahteraan penduduk salah satunya dapat diukur perubahan pola konsumsi rumah tangga. Jika alokasi untuk konsumsi makanan semakin rendah maka untuk konsumsi non-makanan akan menjadi semakin tinggi. Peningkatan pendapatan diikuti dengan peningkatan konsumsi bukan makanan, karena pada saat tertentu konsumsi untuk makanan akan sampai pada titik jenuh. Pengeluaran perkapita merupakan salah satu komponen dalam perhitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Komponen pengeluaran terbagi atas pengeluaran untuk makanan dan pengeluaran untuk non makanan.

Aspek yang tak kalah penting menggambarkan kualitas hidup manusia adalah standar hidup layak yang digambarkan dengan indikator pengeluaran perkapita per tahun yang disesuaikan. Indikator ini dapat mengetahui tingkat sensitivitas terhadap perubahan kondisi perekonomian. Selama periode 2010-2019 pengeluaran perkapita yang disesuaikan di Kabupaten Pinrang menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahunnya. Pada tahun

2010 tercatat pengeluaran perkapita sebulan sebesar 10.253 ribu rupiah, selanjutnya tujuh tahun kemudian rata-rata pengeluaran perkapita per bulan pada tahun 2019 adalah sebesar 11.828 ribu rupiah. Kenaikan dalam kurun waktu sembilan tahun terakhir mencapai 1.575 ribu rupiah, kondisi ini cukup menggembirakan karena dapat diartikan rata-rata daya beli masyarakat Kabupaten Pinrang mengalami kenaikan lebih dari satu juta dalam 9 tahun terakhir.



Gambar 12 Pengeluaran Perkapita Pertahun Kabupaten Pinrang Tahun 2010-2019 (dalam ribuan rupiah)

Kecenderungan meningkatnya pengeluaran perkapita penduduk berkorelasi dengan kemajuan pembangunan di wilayah Kabupaten Pinrang. Dan hal ini berimplikasi pada semakin

meningkatnya pendapatan penduduk di hampir semua sektor. Selain itu peningkatan ini juga berkorelasi dengan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pinrang. Selama tahun 2019, pendapatan perkapita penduduk cenderung menunjukkan tren yang semakin meningkat. Hal ini tidak terlepas dari implikasi kegiatan pembangunan yang sedang terus berjalan di Kabupaten Pinrang, terutama disektor pertanian, perdagangan dan jasa.

<https://pinrangkab.bps.go.id>

Bab 3.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)



PM sangat diperlukan sebagai salah satu instrument kebijakan fiskal dan juga dapat mencerminkan kinerja

Pemerintah pusat maupun daerah. Berbagai kebijakan pemerintah berlandaskan IPM adalah bentuk perhatian pemerintah terhadap kondisi dasar masyarakat yang terdiri dari kesehatan, pendidikan dan pendapatan. Oleh karenanya sangat dibutuhkan data yang terpercaya untuk menyusun itu semua.

Tinggi rendahnya IPM tidak dapat lepas dari program-program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Namun, yang perlu disadari adalah peningkatan IPM tidak serta merta terjadi dengan mudah karena proses pembangunan manusia tidak dapat dilakukan dalam waktu singkat.

Tercapainya kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan utama dari suatu pembangunan manusia. Berbagai upaya yang bisa dilakukan adalah dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan standar hidup, mengurangi kemiskinan, meningkatkan anggaran pendidikan, meningkatkan anggaran kesehatan, dan berbagai program lainnya.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah indeks komposit yang disusun dari tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut

mencakup kesehatan, pengetahuan, serta standar hidup layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup ketika lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi standar hidup layak digunakan indikator pengeluaran per kapita yang disesuaikan (PPP - *Purchasing Power Parity*/paritas daya beli dalam rupiah). Kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak.

Tabel 10 Dimensi, Indikator dan Indeks Dimensi Pembangunan Manusia

Dimensi	Indikator	Indeks Dimensi
(1)	(2)	(3)
Kesehatan	Angka Harapan saat lahir (AHH)	Indeks harapan hidup => Indeks kesehatan
Pengetahuan	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Indeks pendidikan => Indeks pengetahuan
	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	

Standar Hidup Layak	Pengeluaran per kapita disesuaikan (PPP Rupiah)	Indeks Pedapatan => Indeks Pengeluaran
----------------------------	---	--

3.1 Sumber Data

Sumber data utama yang digunakan dalam penghitungan IPM adalah data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) KOR dan Susenas Modul Konsumsi, data Survei Penduduk Antar Sensus (Supas), Proyeksi Penduduk dan Indeks Harga Konsumen (IHK).

Data Susenas KOR digunakan untuk menghitung dua indikator pembentuk IPM yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Sementara Angka Harapan Hidup (AHH) dihitung menggunakan data Supas dan Proyeksi Penduduk. Indikator daya beli atau PPP dihitung menggunakan data Susenas modul konsumsi yang didasarkan pada 96 komoditi. Sementara itu, untuk mendapatkan pengeluaran per kapita riil digunakan Indeks Harga Konsumen sebagai deflator.

3.2 Manfaat IPM

IPM ini dapat dimanfaatkan untuk beberapa, diantaranya:

➤ **Ukuran Keberhasilan**

IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia.

➤ **Target Pembangunan**

Dalam pembahasan asumsi makro di DPR-RI, IPM dijadikan salah satu indikator target pembangunan.

➤ **Dana Alokasi Umum**

IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator dalam penentuan Dana Alokasi Umum (DAU).

3.3 Komponen Indeks Pembangunan Manusia

3.3.1 Indeks Kesehatan

Angka Harapan Hidup (AHH) merupakan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. AHH dapat mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat. Penghitungan AHH melalui pendekatan tak langsung (*Indirect Estimation*) menggunakan paket program *Micro Computer Program for Demographic Analysis (MCPDA)* atau Mortpack. Dari hasil proyeksi Sensus Penduduk 2010. Jenis data yang digunakan adalah data Anak Lahir Hidup (ALH) dan Anak Masih Hidup (AMH),

selanjutnya dipilih metode Trussei dengan metode west yang dianggap sesuai dengan histori kependudukan Indonesia dengan negara-negara Asia Tenggara umumnya (Preston, 2004).

$$I_{KESEHATAN} = \frac{AHH - AHH_{min}}{AHH_{maks} - AHH_{min}}$$

Keterangan

$I_{kesehatan}$: Indeks Kesehatan

AHH : Angka Harapan Hidup

AHH_{min} : Angka Harapan Hidup Minimum 20 Tahun

AHH_{maks} : Angka Harapan Hidup Maksimum 85 Tahun

Indeks Kesehatan dihitung dengan menghitung nilai maksimum dan nilai minimum harapan hidup sesuai standar UNDP, yaitu angka tertinggi sebagai batas atas untuk penghitungan indeks dipakai 85 tahun dan terendah 20 tahun.

3.3.2 Indeks Pengetahuan

Komponen pembentuk IPM dari dimensi pengetahuan adalah Rata-Rata Lama Sekolah (*RLS/Mean Years of Schooling*) dan Harapan Lama Sekolah (*HLS/Expected Years of Schooling*). Pada proses pembentukan IPM, penggabungan kedua indikator ini

digunakan sebagai indeks pengetahuan yang merupakan salah satu komponen pembentuk IPM.

Rata-rata lama sekolah (RLS) menggambarkan jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Cakupan penduduk yang dihitung RLS adalah penduduk berumur 25 tahun keatas. Penghitungan RLS pada umur 25 tahun ke atas mengikuti standar internasional yang digunakan UNDP.

$$I_{RLS} = \frac{RLS - RLS_{min}}{RLS_{maks} - RLS_{min}}$$

Keterangan:

I_{RLS} : Indeks Rata-rata Lama Sekolah

RLS : Rata-rata Lama Sekolah

RLS_{min} : Rata-rata Lama Sekolah Minimum 0 Tahun

RLS_{maks} : Rata-rata Lama Sekolah Maksimum 25 Tahun

Indeks RLS dihitung dengan menghitung nilai maksimum dan nilai minimum harapan hidup sesuai standar UNDP, yaitu angka tertinggi sebagai batas atas untuk penghitungan indeks dipakai 25 tahun dan terendah 0 tahun.

Harapan lama sekolah (HLS) adalah lamanya sekolah dalam tahun yang diharapkan akan dirasakan oleh anak umur tertentu

pada masa mendatang. HLS dihitung pada umur 7 tahun ke atas karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar. Untuk mengakomodir penduduk yang tidak tercakup dalam Susenas, HLS dikoreksi dengan siswa yang bersekolah di pesantren.

$$I_{HLS} = \frac{HLS - HLS_{min}}{HLS_{maks} - HLS_{min}}$$

Keterangan:

I_{HLS} : Indeks Harapan Lama Sekolah

HLS : Harapan Lama Sekolah

HLS_{min} : Harapan Lama Sekolah Minimum 0 Tahun

HLS_{maks} : Harapan Lama Sekolah Maksimum 18 Tahun

HLS menggunakan batasan sesuai kesepakatan beberapa Negara, yaitu batas maksimum 18 tahun, sedangkan batas minimumnya 0 (nol) tahun. Untuk memperoleh nilai Indeks pengetahuan maka kedua Indeks pembentuknya, baik Indeks Rata-rata Lama Sekolah maupun Indeks Harapan Lama Sekolah digabungkan dengan bobot yang sama.

$$I_{Pengetahuan} = \frac{I_{HLS} + I_{RLS}}{2}$$

Keterangan:

I_{Pengentahuan} : Indeks Pengetahuan

I_{RLS} : Indeks Rata-rata Lama Sekolah

I_{HLS} : Indeks Harapan Lama Sekolah

3.3.3 Standar Hidup Layak

Dimensi selanjutnya dari ukuran kualitas hidup manusia adalah standar hidup layak. Dalam cakupan lebih luas, standar hidup layak menggambarkan tingkat kesejahteraan yang dinikmati oleh penduduk sebagai dampak semakin membaiknya ekonomi. Standar hidup layak diproksi dengan indikator pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Pengeluaran per kapita yang disesuaikan ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli.

Rata-rata pengeluaran per kapita setahun diperoleh dari Susenas Modul dan dibuat konstan/riil dengan tahun dasar 2012=100. Penghitungan Paritas Daya Beli menggunakan 96 komoditas dengan rincian 66 komoditas merupakan makanan dan sisanya merupakan komoditas non makanan. Rumus untuk penghitungan Paritas Daya Beli adalah:

$$PPP_j = \prod_{i=1}^m \left(\frac{p_{ij}}{p_{ik}} \right)^{1/m}$$

Paritas Daya Beli dengan menggunakan harga komoditas di Jakarta Selatan sebagai pembanding harga di Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Berdasarkan nilai rata-rata pengeluaran per kapita riil dan paritas daya beli akan diperoleh pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Setelah itu, Indeks pengeluaran sebagai komponen IPM dihitung dengan:

$$I_{Pengeluaran} = \frac{\ln(\text{pengeluaran}) - \ln(\text{pengeluaran}_{min})}{\ln(\text{pengeluaran}_{maks}) - \ln(\text{pengeluaran}_{min})}$$

Tabel 11 Komoditi Kebutuhan Pokok Dasar Penghitungan Daya Beli

Kelompok	Terpilih		
	Share kelompok	Share	Jumlah Item
(1)	(2)	(3)	(4)
Makanan	47,29	39,82	66
Padi-padian	8,02	7,89	2
Umbi-umbian	0,42	0,23	2
Ikan/udang/cumi/kerang	3,95	2,3	7
Daging	2,06	1,69	3
Telur dan susu	2,76	2,37	4

Sayur-sayuran	3,56	2,04	7
Kacang-kacangan	1,26	1,17	2
Buah-buahan	2,21	1,22	7
Minyakdan lemak	1,79	1,75	3
Bahan minuman	1,64	1,47	3
Bumbu-bumbuan	0,95	0,4	3
Konsumsi lainnya	1	0,61	1
Makanan dan minuman jadi	11,8	10,94	19
Tembakau dan sirih	5,88	5,72	3

Kelompok	Terpilih		
	Share kelompok	Share	Jumlah Item
(1)	(2)	(3)	(4)
Non makanan	52,71	33,81	30
Perumahan dan fasilitas rumah tangga	20,58	15,74	10
Aneka barang dan jasa	18,79	13,5	12
Pakaian, alas kaki,tutup kepala	3,76	3,35	4
Barang tahan lama	6,15	1,22	4
Pajak, pungutan, asuransi	1,65	0	0
Keperluan, pesta, upacara/kenduri	1,78	0	0
Total	100	73,63	96

Sumber : BPS, Susenas

Dalam menghitung indeks masing-masing komponen IPM digunakan batas maksimum dan minimum dibawah ini:

Tabel 12 Nilai Maksimum dan Minimum dari Setiap Komponen IPM

Komponen IPM	Maksimum	Minimum	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
Angka Harapan Hidup saat lahir (AHH)	85	20	Standar UNDP
Harapan lama sekolah (tahun)	18	0	Standar UNDP
Rata-rata lama sekolah (tahun)	15	0	Standar UNDP
Daya beli (rupiah)	26.572.352**)	1.007.436*)	Pengeluaran perkapita riil disesuaikan

Keterangan:

*) Daya beli minimum merupakan garis kemiskinan terendah kabupaten tahun 2010 (data empiris) yaitu di Tolikara- Papua.

***) Daya beli maksimum merupakan nilai tertinggi

kabupaten yang diproyeksikan hingga 2025 (akhir RPJPN) yaitu perkiraan pengeluaran per kapita Jakarta Selatan tahun 2025.

Selanjutnya nilai IPM dapat dihitung sebagai berikut:

$$IPM = \sqrt[3]{I_{kesehatan} \times I_{pengetahuan} \times I_{pengeluaran}}$$

Ada dua hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaan indeks indeks ini. Pertama, lebih dari sekedar mengukur pendapatan atau produksi yang dihasilkan suatu daerah, indeks ini mengukur kesejahteraan manusia secara lebih menyeluruh. Kedua, walaupun demikian, indeks ini tidak dengan sendirinya menyajikan gambaran yang utuh. Berbagai indikator pembangunan manusia lainnya masih harus ditambahkan untuk melengkapinya.

3.3.4 Reduksi Shortfall

Untuk mengukur kecepatan perkembangan IPM dalam suatu kurun waktu digunakan reduksi *shortfall* per tahun. Reduksi *shortfall* menunjukkan perbandingan antara capaian yang di tempuh dengan capaian yang harus ditempuh untuk mencapai titik IPM yang ideal

(100). Semakin tinggi nilai reduksi *shortfall*, semakin cepat peningkatan IPM.

Reduksi shortfall dihitung dengan:

$$r = \left[\frac{IPM_{t+n} - IPM_t}{IPM_{ideal} - IPM_t} \right]^{1/n}$$

Keterangan :

r : reduksi shortfall

t : tahun

n : selisih tahun antar IPM

IPM_{ideal} : 100

Pengklasifikasian pembangunan manusia seperti pada Tabel 13 bertujuan untuk mengorganisasikan wilayah-wilayah menjadi kelompok-kelompok yang sama dalam pembangunan manusia. Berdasarkan nilai IPM-nya, dapat diketahui bagaimana status pembangunan manusia di suatu wilayah, apakah termasuk berstatus sangat tinggi, tinggi, sedang ataupun rendah.

Tabel 13 Kriteria Tingkatan Status Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Kriteria	Status Pembangunan Manusia
(1)	(2)
IPM < 60	Rendah
60 < IPM < 70	Sedang
70 < IPM < 80	Tinggi
IPM > 80	Sangat Tinggi

Selain itu, IPM dapat digunakan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara/daerah adalah negara/daerah maju, atau terbelakang, serta IPM dapat mengukur pengaruh dari kebijakan ekonomi terhadap kualitas hidup. Indeks ini lebih fokus pada hal-hal yang lebih sensitif dan berguna daripada hanya sekedar pendapatan perkapita yang selama ini digunakan. Indeks ini juga berguna sebagai jembatan bagi peneliti yang serius untuk mengetahui hal-hal yang lebih terinci dalam membuat laporan pembangunan manusianya.

Indeks Pembangunan Manusia sudah merupakan angka standar, sehingga dari IPM suatu wilayah dapat dibandingkan dengan IPM wilayah/daerah lain. Atau dapat dikatakan, dengan menghitung IPM Kabupaten Pinrang kita bisa mengetahui posisi

Kabupaten Pinrang dalam hal pembangunan manusianya diantara daerah-daerah yang lain.

3.4 Gambaran Pencapaian Pembangunan Manusia Kabupaten Pinrang

Berdasarkan teknik penghitungan yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka akan diperoleh komponen pembentuk IPM, sebagai berikut:

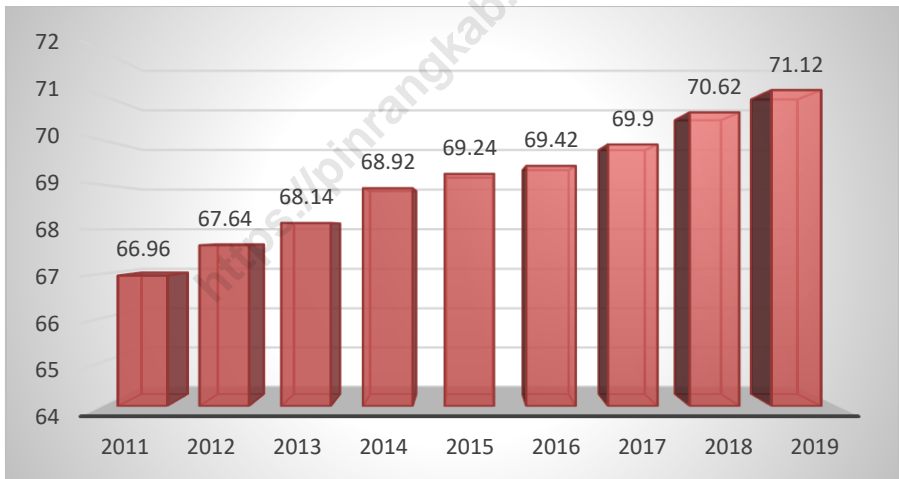
Tabel 14 Indeks Pembentuk IPM Kabupaten Pinrang, 2016-2019

URAIAN (ANGKA)	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Harapan Hidup (tahun)	68,55	68,68	68,98	69,39
Harapan Lama Sekolah (tahun)	13,18	13,19	13,20	13,22
Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	7,48	7,54	7,84	7,85
Pengeluaran Riil Perkapita yang Disesuaikan (Ribuan Rupiah)	10.899	11.279	11.508	11.828
Indeks Kesehatan	74,69	74,89	75,35	75,98
(Indeks HLS)	73,22	73,27	73,33	73,44
(Indeks RLS)	49,87	50,27	52,27	52,33
Indeks Pendidikan	61,54	61,77	62,80	62,89
Indeks Pengeluaran	72,77	73,81	74,43	75,27
IPM	69,42	69,9	70,62	71,12

Sumber : BPS

Pembangunan manusia di Kabupaten Pinrang dari tahun ke tahun menunjukkan perbaikan kearah yang lebih baik. Hal ini

didasarkan pada angka IPM yang terus mengalami kenaikan. Penggunaan perhitungan IPM metode baru ternyata membuat dampak terjadinya penurunan dari segi nilai tetapi pada hakikatnya tetap terjadi kenaikan. Setidaknya sejak tahun 2010 hingga tahun 2019 (lihat Gambar 17), IPM Kabupaten Pinrang mengalami kenaikan sebesar 4,87 poin dari tahun 2010 sampai tahun 2019. Peningkatan tersebut merupakan indikasi yang kuat untuk menyatakan bahwa di Kabupaten Pinrang telah terjadi perbaikan pada aspek kesehatan, pendidikan serta ekonomi.



Gambar 13 IPM Kabupaten Pinrang 2010-2019

Jika mengaju pada ska9a internasional, capaian IPM Kabupaten Pinrang dalam kurun waktu tujuh tahun terakhir termasuk kategori

sedang ($60 < \text{IPM} < 70$). Hal ini terjadi sejak tahun 2010 hingga tahun 2017, IPM Kabupaten Pinrang masih stagnan pada kategori IPM sedang. Tumbuhnya berbagai pusat bisnis ternyata mampu mempertahankan IPM Kabupaten Pinrang kearah yang lebih baik, terbukti pada tahun 2018 sudah mencapai 70,62 (kategori tinggi).

Sementara itu, jika dibandingkan dengan daerah sekitarnya, Kabupaten Pinrang menempati IPM urutan ke-6 tertinggi se- Sulawesi Selatan. Kabupaten/kota dengan IPM tertinggi adalah Kota Makassar, Kota Palopo, Kota Pare-pare, diikuti Kabupaten Luwu Timur, dan Enrekang. Tiga peringkat teratas ditempati oleh tiga kota yang ada di wilayah Sulawesi Selatan. Sementara peringkat selanjutnya yaitu peringkat 4, 5 dan 6 ditempati oleh kabupaten yang berada di sekitar kota-kota dengan IPM tertinggi. Hal ini menyiratkan bahwa kemajuan pendidikan, kesehatan dan perekonomian di wilayah tertentu akan mempengaruhi pula daerah- daerah penyangga yang berlokasi di sekitarnya.

Pada Tabel 15, terlihat bahwa peringkat IPM tertinggi pada tahun 2019 di Provinsi Sulawesi Selatan adalah Kota Makasar, disusul oleh Kota Palopo dan Kota Pare-Pare. Kabupaten Pinrang sendiri berada pada urutan yang baik (peringkat 6 dari 24 kabupaten/kota).

Tabel 15 IPM Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan, Tahun 2019

Kode Prov/Kab/Kota	Provinsi/Kab/Kota	Harapan Hidup (tahun)	Harapan Lama Sekolah (tahun)	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	Pengeluaran Riil Perkapita yang disesuaikan (ribuan rupiah)	IPM	Rank IPM*)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
7300	Sulawesi Selatan	70,43	13,36	8,26	11.118	71,66	-
7301	Kepulauan Selayar	68,34	12,48	7,63	9.028	66,91	22
7302	Bulukumba	67,69	12,91	7,43	10.480	68,28	17
7303	Bantaeng	70,42	12,03	6,48	11.592	68,30	15
7304	Jeneponto	66,24	11,97	6,48	9.078	64,00	24
7305	Takalar	67,01	12,25	7,18	10.474	66,94	21
7306	Gowa	70,37	13,48	7,97	9.369	69,66	10
7307	Sinjai	67,17	12,87	7,48	9.465	67,05	20
7308	Maros	68,98	13,02	7,46	10.981	69,50	11
7309	Pangkajene Kepulauan	66,49	12,51	7,60	11.392	68,29	16
7310	Barru	68,91	13,57	7,96	10.911	70,60	8
7311	Bone	66,88	12,80	6,98	8.954	65,67	23
7312	Soppeng	69,43	12,73	7,74	9.444	68,26	18
7313	Wajo	67,17	13,13	6,80	12.399	69,05	14
7314	Sindereng rappang	69,59	12,93	7,83	12.039	71,05	7
7315	Pinrang	69,39	13,22	7,85	11.828	71,12	6
7316	Enrekang	70,83	13,69	8,89	10.800	72,66	5
7317	Luwu	70,19	13,32	8,15	10.085	70,39	9
7318	Tana Toraja	73,15	13,58	8,02	7.253	68,25	19
7322	Luwu Utara	68,31	12,42	7,78	11.583	69,46	12
7325	Luwu Timur	70,38	12,82	8,54	12.802	72,80	4
7326	Toraja Utara	73,35	13,37	7,92	8.083	69,23	13
7371	Makassar	72,00	15,56	11,20	16.989	82,25	1
7372	Pare-pare	71,18	14,49	10,30	13.648	77,62	3
7373	Palopo	70,79	15,07	10,75	12.986	77,98	2

Sumber : BPS

Data hasil perhitungan IPM yang menunjukkan bahwa Kabupaten Pinrang pada posisi yang relatif baik. Komponen penyusun IPM Kabupaten Pinrang memiliki angka di atas rata-rata Provinsi Sulawesi Selatan pada bagian pengeluaran riil perkapita. Daya beli di Kabupaten Pinrang menunjukkan bahwa Paritas daya beli (PPP) sebesar 11.828 ribu rupiah atau berada di atas PPP Provinsi Sulawesi Selatan yang hanya 11.118 ribu rupiah saja.

Namun, terdapat komponen penyusun IPM Kabupaten Pinrang yang berada di bawah rata-rata Provinsi Sulawesi Selatan, meliputi: angka harapan hidup, angka harapan lama sekolah, dan rata-rata lama sekolah. Angka harapan hidup Kabupaten Pinrang sebesar 69,39 tahun, sedangkan angka harapan hidup provinsi Sulawesi Selatan sebesar 70,43 tahun. Harapan lama sekolah Kabupaten Pinrang sebesar 13,22 tahun. Angka ini di bawah angka harapan lama sekolah Provinsi Sulawesi Selatan yang sebesar 13,36 tahun. Demikian pula yang terjadi pada angka rata-rata lama sekolah untuk Kabupaten Pinrang sebesar 7,85 tahun berada di bawah rata-rata lama sekolah Provinsi Sulawesi Selatan (8,26 tahun).

AHH Kabupaten Pinrang yang masih di bawah rata-rata mengindikasikan bahwa pemerintah Kabupaten Pinrang harus lebih

meningkatkan sarana dan dan prasarana bidang kesehatan agar kedepannya masyarakat bisa lebih sejahtera dan sehat sehingga memiliki umur yang panjang atau meningkatkan AHH.

Kendati HLS di Kabupaten Pinrang sudah menuju kearah yang positif bukan berarti pemerintah boleh menghentikan pembangunan di bidang pendidikan. Harapan lama sekolah merupakan pemicu (*booster*) bagi peningkatan pembanguan manusia dibidang pendidikan. Karena itu diharapkan pemerintah Kabupaten Pinrang dapat lebih meningkatkan pembangunan sarana prasarana serta kualitas pendidikan.

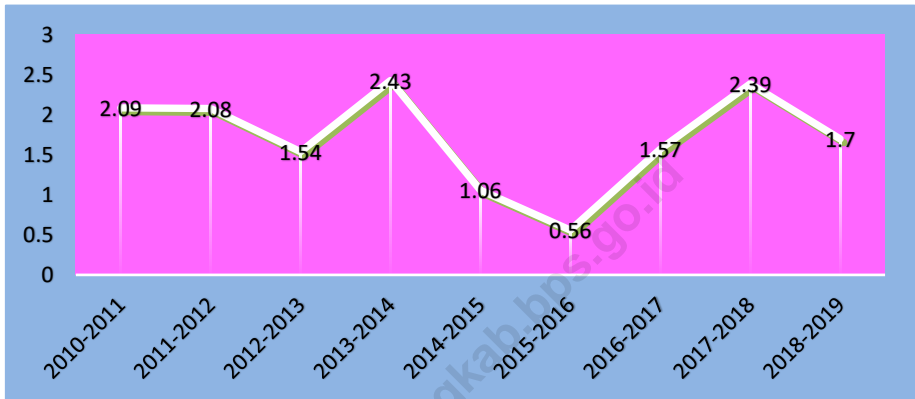
Yang tak kalah penting adalah mencermati paritas daya beli penduduk di Kabupaten Pinrang yang menunjukkan daya beli cukup tinggi. Kondisi ini tak terlepas dari lokasi yang dekat dengan kota- kota penyangga seperti Kota Pare-Pare maupun Kota Makasar. Akses yang mudah dan budaya secara umum suku-suku di Pinrang yang lebih konsumtif menyebabkan paritas daya beli yang tinggi. Mencermati kondisi seperti itu, maka pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Pinrang hendaknya masih harus diupayakan sedemikian rupa sehingga mengalami pertumbuhan yang relatif lebih tinggi dan lebih

merata, yaitu dapat dinikmati oleh seluruh penduduk di Kabupaten Pinrang.

Peringkat tertinggi nomor enam dalam pembangunan manusia di provinsi Sulawesi Selatan menjadikan pemerintah Kabupaten Pinrang hendaknya tetap mawas diri dan tetap terus melakukan upaya-upaya pembangunan yang pro-rakyat yaitu dengan lebih meningkatkan kualitas pembangunan agar dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat, terutama di bidang pendidikan. Sehingga, kedepannya pembangunan manusia di Kabupaten Pinrang semakin baik yang ditunjukkan oleh terus meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia sebagai salah satu indikator keberhasilan pembangunan di kabupaten ini. Karena bukan tidak mungkin suatu saat nanti jika berbagai indikator sudah terpenuhi Kabupaten Pinrang bisa bertransformasi menjadi sebuah kota.

Reduksi *shortfall* adalah indikator untuk mengukur kecepatan perkembangan IPM dalam kurun waktu tertentu. Gambar 18 menunjukkan *Reduksi Shortfall* per tahun. Berdasarkan gambar tersebut, terlihat bahwa kecepatan perkembangan IPM pada tahun 2018-2019 menurun menjadi 1,7 dibanding pada tahun 2017-2018. Kecepatan perkembangan IPM tahun 2017-2018 meningkat

cukup tinggi hingga mencapai 2,39. Meskipun kecepatan perkembangan IPM paling tinggi terjadi pada tahun 2013-2014. Sementara perkembangan paling lambat terjadi pada 2015-2016.



Gambar 14 Reduksi *Shortfall* per tahun, 2010-2019

Keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur berdasarkan tingginya angka IPM saja melainkan juga melihat sejauh mana IPM tersebut melaju dari waktu ke waktu. Jika semakin rendah kecepatan peningkatan IPM, maka semakin lama pulalah waktu yang dibutuhkan untuk mencapai angka IPM yang ideal karena reduksi *shortfall* adalah gambaran laju pergerakan IPM untuk mencapai nilai ideal 100.

Dapat dikatakan juga bahwa reduksi *shortfall* merupakan perbandingan antara capaian yang telah ditempuh dengan capaian

yang ingin ditempuh yaitu titik ideal IPM yaitu 100. Untuk Kabupaten Pinrang sendiri kecepatan untuk mencapai titik ideal kurun waktu 2018-2019 mengalami laju yang tinggi selama sembilan tahun terakhir, karena tren *shortfall* menunjukkan peningkatan yang semakin tajam setelah tahun 2016. Hal ini merupakan indikasi awal bahwa berbagai komponen penting dalam IPM yaitu kesehatan (Angka Harapan Hidup), pendidikan (*RLS* dan *HLS*) dan standar hidup layak (*PPP*) di Kabupaten Pinrang setidaknya sembilan tahun terakhir telah mengalami peningkatan. Jika kondisi ini terus berlanjut maka ada kemungkinan untuk mencapai kondisi ideal (100) atau menjadi daerah yang maju.

Daftar Istilah Statistik

Definisi Istilah-Istilah Statistik

Anak Lahir Hidup

Banyaknya kelahiran hidup dari sekelompok atau beberapa kelompok perempuan selama masa reproduksinya. Anak yang pada waktu dilahirkan menunjukkan tanda-tanda kehidupan walaupun mungkin hanya beberapa saat saja seperti jantung berdenyut, bernafas, dan menangis. Anak yang pada waktu lahir tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan disebut lahir mati.

Anak Masih Hidup

Jumlah anak masih hidup yang dimiliki seorang perempuan sampai saat wawancara dilakukan.

Angka Harapan Hidup pada Waktu Lahir

Perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur.

Angka Kematian Balita (AKBa)

Jumlah kematian anak berumur 0-4 tahun selama satu tahun tertentu per 1000 anak umur yang sama pada pertengahan tahun itu (termasuk kematian bayi).

Angka Kematian Bayi (AKB)

Jumlah bayi yang meninggal sebelum mencapai umur satu tahun per 1000 kelahiran hidup.

Akses terhadap fasilitas kesehatan

Persentase rumah tangga yang tinggal pada jarak kurang dari 5 kilometer dari fasilitas kesehatan (rumah sakit, klinik, puskesmas, dokter, juru rawat, bidan yang terlatih, paramedik dan sebagainya).

Anak dibawah lima tahun (Balita) yang kekurangan gizi

Merujuk pada anak dengan berat badan kurang (menderita kurang gizi tingkat sedang dan parah). Kekurangan gizi sedang merujuk pada persentase anak berumur dibawah lima tahun yang memiliki berat badan dibawah dua standar deviasi dari median berat badan anak berumur tersebut. Kekurangan gizi parah merujuk pada persentase anak berumur dibawah tiga standar deviasi dari median berat badan anak berumur tersebut.

Angka Morbiditas

Proporsi dari keseluruhan penduduk yang menderita akibat masalah kesehatan hingga mengganggu aktivitas sehari-hari selama satu bulan terakhir.

Angka Melek Huruf (dewasa)

Proporsi penduduk berumur 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis dalam huruf Latin atau lainnya.

Angka Buta Huruf (dewasa)

Proporsi penduduk berumur 15 tahun ke atas yang tidak dapat membaca dan menulis dalam huruf Latin atau lainnya. Dihitung dengan cara 100 dikurangi dengan angka melek huruf (dewasa).

Angka Partisipasi Sekolah

Proporsi dari keseluruhan penduduk dari berbagai kelompok umur tertentu (7-12; 13-15; 16-18; dan 19-24) yang masih duduk di bangku sekolah.

Angka putus sekolah

Proporsi dari penduduk berumur antara 7 hingga 15 tahun yang tidak terdaftar pada berbagai tingkatan pendidikan dan tidak menyelesaikan sekolah dasar atau sekolah menengah tingkat pertama.

Dapat membaca dan menulis

Dapat membaca dan menulis kata-kata/kalimat sederhana dalam aksara tertentu.

Garis Kemiskinan

Nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar kebutuhan-kebutuhan pangan yang setara dengan 2.100 kkal per kapita per hari dan nonpangan yang dibutuhkan oleh individu untuk dapat hidup secara layak.

Paritas daya beli [Purchasing Power Parity PPP]

PPP memungkinkan dilakukannya perbandingan harga-harga riil antar provinsi dan antar kabupaten, mengingat nilai tukar yang biasa digunakan dapat menurunkan atau menaikkan nilai daya beli yang terukur dari konsumsi perkapita yang telah disesuaikan. Dalam konteks PPP untuk Indonesia, satu rupiah di suatu provinsi memiliki daya beli yang sama dengan satu rupiah di Jakarta. PPP dihitung berdasarkan pengeluaran riil perkapita setelah disesuaikan dengan indeks harga konsumen dan penurunan utilitas marginal yang dihitung dengan rumus Atkinson.

Konsumsi Total

Konsumsi barang-barang dan jasa-jasa dengan mengabaikan asal barang dan jasa tersebut. Konsumsi total juga mencakup pemberian dan barang/jasa yang diproduksi sendiri oleh rumah tangga yang bersangkutan. Dalam laporan ini, konsumsi total merujuk pada konsumsi bulanan.

Pengeluaran untuk Makanan

Proporsi pengeluaran yang dipergunakan untuk mengkonsumsi makanan dibandingkan dengan total pengeluaran (makanan dan bukan makanan).

Pertumbuhan Ekonomi

Perubahan relatif nilai riil produk domestik bruto dalam suatu periode tertentu.

Produk Domestik Bruto (PDB)

Jumlah nilai tambah bruto (total output dari barang dan jasa) yang diproduksi oleh semua sektor ekonomi di suatu negara selama periode waktu tertentu.

Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Berlaku

Merujuk pada nilai produk domestik bruto berdasarkan nilai uang yang berlaku pada tahun tersebut

Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Konstan

Merujuk pada nilai produk domestik bruto berdasarkan nilai uang pada tahun yang dipergunakan sebagai tahun dasar.

Produk Domestik Bruto per Kapita

Nilai dari produk domestik bruto dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun

Rata-rata lama sekolah (Mean Years of Schooling)

Rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berumur 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani.

Indeks Harapan Hidup

Salah satu dari tiga komponen indeks pembangunan manusia. Nilai indeks ini berkisar antara 0 - 100.

Indeks Pendidikan

Salah satu dari tiga komponen indeks pembangunan manusia. Indeks ini didasarkan pada kombinasi antara angka melek huruf di kalangan penduduk dewasa dan rata-rata lama sekolah. Nilai indeks tersebut berkisar antara 0 hingga 100.

Indeks Daya Beli

Salah satu dari tiga komponen indeks pembangunan manusia yang didasarkan pada paritas daya beli (PPP) disesuaikan dengan rumus Atkinson. Nilai indeks berkisar antara 0 - 100.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks komposit yang disusun dari tiga indikator: lama hidup yang diukur dengan angka harapan hidup ketika lahir; pendidikan yang diukur berdasarkan rata-rata lama sekolah dan angka melek huruf penduduk umur 15 tahun ke atas; dan standar hidup yang diukur dengan pengeluaran per kapita (PPP rupiah). Nilai indeks berkisar antara 0-100.

Indeks Pembangunan Jender (IPJ)

Indeks komposit yang dibangun dari beberapa variabel untuk mengukur pencapaian pembangunan manusia dengan memperhatikan disparitas jender. Komponen-komponen IPJ sama dengan komponen-komponen IPM yang telah disesuaikan dengan memasukkan disparitas tingkat pencapaian antara laki-laki dan perempuan. Nilai indeks berkisar antara 0 - 100.

Indeks Pemberdayaan Jender (IDJ)

Indeks komposit yang disusun dari beberapa variabel yang mencerminkan tingkat keterlibatan perempuan dalam proses pengambilan keputusan di bidang politik dan ekonomi. IDJ didasarkan pada tiga indikator: persentase perempuan di parlemen, persentase perempuan di lingkungan pekerja profesional, teknisi, tenaga kepemimpinan dan ke tatalaksanaan, serta sumbangan perempuan sebagai penghasil pendapatan. Nilai indeks tersebut berkisar antara 0 - 100.

Indeks Kemiskinan Manusia (IKM)

Indeks komposit yang mengukur deprivasi (keterbelakangan) dalam tiga dimensi: lamanya hidup, pengetahuan dan standar hidup layak.

Imunisasi

Memasukkan kuman penyakit yang sudah dilemahkan kedalam tubuh dengan cara suntik atau telan dengan maksud agar terjadi kekebalan terhadap jenis penyakit tertentu pada tubuh.

Tidak/belum pernah sekolah

Tidak atau belum pernah bersekolah di sekolah formal, misalnya tamat/belum tamat Taman Kanak-kanak tetapi tidak melanjutkan ke SD.

Masih bersekolah

Sedang mengikuti pendidikan menengah, atau tinggi baik pada jenjang dasar pendidikan.

Tidak sekolah lagi

Pernah mengikuti pendidikan dasar, menengah atau tinggi, tetapi pada saat pencacahan tidak bersekolah lagi.

Tamat sekolah

Menyelesaikan pelajaran pada kelas atau tingkat terakhir suatu jenjang sekolah di sekolah negeri maupun swasta dengan mendapatkan tanda tamat/ijazah. Orang yang belum mengikuti pelajaran pada kelas tertinggi tetapi telah mengikuti ujian dan lulus dianggap tamat sekolah.

Medis Operasi Perempuan (MOW/sterilisasi perempuan/tubektomi)

Operasi yang dilakukan pada perempuan untuk mencegah terjadinya kehamilan, yaitu mengikat saluran telur agar perempuan itu tidak dapat mempunyai anak lagi. Operasi untuk mengambil rahim atau indung telur kadang-kadang dilakukan karena alasan-alasan lain, dan bukan untuk memberikan perlindungan agar perempuan tidak mempunyai anak lagi. Yang dicatat sebagai sterilisasi di sini hanya operasi yang ditujukan agar seorang perempuan tidak bisa mempunyai anak lagi.

Medis Operasi Pria (MOP/sterilisasi Pria/Vasektomi)

Suatu operasi ringan yang dilakukan pada pria dengan maksud untuk mencegah terjadinya kehamilan pada pasangannya. IUD/Spiral Alat yang dibuat dari plastik halus/tembaga, berukuran kecil, berbentuk spiral, T, kipas dan lainnya, dipasang di dalam rahim untuk mencegah terjadinya kehamilan.

Suntikan KB

Salah satu cara pencegahan kehamilan dengan jalan menyuntikkan cairan tertentu kedalam tubuh, misalnya satu, tiga atau enam bulan sekali. Cara ini disebut juga depo provera.

Pil KB

Pil yang ditelan untuk mencegah terjadinya kehamilan. Pil ini harus ditelan secara teratur setiap hari. Orang dikatakan sedang menggunakan pil KB, apabila sejak haid terakhir ia menelan pil KB setiap hari.

Kondom/karet KB

Alat yang terbuat dari karet, berbentuk seperti balon, yang dipakai oleh laki-laki selama bersenggama dengan maksud agar istrinya/ pasangannya tidak menjadi hamil. Orang dikatakan sedang menggunakan kondom apabila sejak haid terakhir pasangannya selalu menggunakan kondom waktu berkumpul, termasuk saat kumpul terakhir.

Norplant/implant/susuk KB

Enam batang logam kecil yang dimasukkan kebawah kulit lengan atas untuk mencegah terjadinya kehamilan. Orang dikatakan menggunakan susuk KB apabila susuk KB terakhir dipasang di tubuhnya kurang dari 5 (lima) tahun sebelum pencacahan.

KB Lainnya

Antara lain intravag yakni tissue KB yang dimasukkan ke dalam vagina sebelum kumpul.

Alat/cara tradisional

Antara lain pantang berkala/sistim kalender, senggama terputus, tidak campur, jamu, dan urut.

<https://pinrangkab.bps.go.id>

Daftar Pustaka

Badan Pusat Statistik. 2012. Indeks Pembangunan Manusia 2010-2012. Jakarta.

Badan Pusat Statistik. 2017. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Pinrang 2015. Pinrang.

Badan Pusat Statistik. 2017. Varia Statistik edisi Oktober 2017. Jakarta.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Pinrang. 2017. Indikator Kesejahteraan Rakyat BPS Kabupaten Pinrang 2016. Pinrang.

Meneg PP dan BPS. 2008. Pembangunan Manusia Berbasis Gender Tahun 2007. Jakarta.

United Nations Development Programme. 1993. Human Development Report. New York. UNDP.

-----, 2009. Human Development Report. New York. UNDP.

-----, 2010. Human Development Report. New York. UNDP.

-----, 2011. Human Development Report. New York. UNDP.



DATA

**Mencerdaskan
Bangsa**



***Badan Pusat Statistik
Kabupaten Pinrang***

Jl. Andi Isa No.18, Sulawesi Selatan
Telp/fax : (0421) 921021
e-mail : bps7315@bps.go.id
homepage : pinrangkab.bps.go.id